

**ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN
ASPEK KEUANGAN**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

JULIANSYAH

1501035189

S1 Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Aspek Keuangan
Nama Mahasiswa : Juliansyah
NIM : 1501035189
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : S1 Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 23 September 2022
Pembimbing,



Dr. Hariman Bone, S.E., M.Sc., CSRS
NIP. 1983051 1200812 1 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof.DR.Hj.Syarifah Hudayah, M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Tanggal Ujian : 15 September 2022

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

Judul Skripsi : Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan Aspek Keuangan

Nama : Juliansyah


NIM : 1501035189


Hari : Kamis

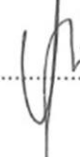
Tanggal Ujian : 15 September 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. Hariman Bone, S.E., M.Sc., CSRS
NIP. 1983051 1200812 1 002
2. Dr. H. Irwansyah, S.E., M.M., CSRS., CIQaR
NIP. 19751110 200112 1 004
3. Dr. Hj. Anisa Kusumawardani, S.E., M.Si., CSRS
NIP. 19771107 200012 2 001

1. 
.....

2. 
.....

3. 
.....

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam skripsi ini dan dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 15 Juni 2022



Juliansyah

ABSTRAK

Juliansyah 2022. Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Aspek Keuangan. Dosen Pembimbing : Hariman Bone.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2020 berdasarkan aspek keuangan yang dilihat dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data berdasarkan aspek keuangan menggunakan rasio keuangan daerah (Kemandirian Keuangan Daerah, Aktivitas, dan Pertumbuhan) dan *Value For Money* (Ekonomis, Efektivitas, dan Efisiensi). Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan aspek keuangan dilihat dari : (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sudah menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak tergantung dengan bantuan Pemerintah Pusat, (2) Rasio Aktivitas menunjukkan kinerja kurang baik karena persentase belanja pembangunan lebih tinggi daripada belanja rutin, (3) Rasio Pertumbuhan menunjukkan kinerja baik dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kurang baik dalam hal belanja pembangunan, (4) *Value For Money* menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sangat ekonomis, efektif, dan efisien dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kata Kunci: Kinerja Pemerintah Daerah, Keuangan.

ABSTRACT

Juliansyah 2022.*Analyze The Perfomance of The Samarinda City Government Based on the Financial Aspect. Dosen Pembimbing: Hariman Bone.*

The purpose of this study is to analyze the performance of the Samarinda City government in 2015-2020 based on the financial aspect (Revenue and Expenditure Budget). This research is a quantitative descriptive study. Data analysis techniques in this study based on financial aspects using regional financial ratios (Regional Financial Independence, Activities, and Growth) and Value For Money (Economical, Effectiveness, and Efficiency). The results of the analysis show that the performance of the Samarinda City Government is based on the financial aspect seen from: (1) the regional financial independence ratio has shown that the Samarinda City government does not depend on the assistance of the central government, (2) activity ratio shows poor performance because the percentage of development spending is higher than routine spending, (3) the growth ratio shows good performance in terms of increasing regional original income and not good in terms of development spending, (4) value for money shows that Samarinda city government is very economical, effective, and efficient in managing the regional revenue and expenditure budget.

Kata kunci: *performance government, financial.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala karunia dan limpahan rahmat-Nya, serta junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Dalam proses studi dan penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak pembelajaran, bimbingan, motivasi dan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan tulus dan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si selaku Rektor Universitas Mulawarman.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
3. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E, M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
4. Bapak Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak., CA., CTA., CFrA selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
5. Dr. Hariman Bone, SE,M.Sc.,CSRS selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi dengan baik dan sabar hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Ibu Annisa Abubakar.M,Si selaku Dosen Wali yang selalu memberikan arahan dan motivasi selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, khususnya dosen program studi Akuntansi yang telah memberikan bantuan, pengetahuan dan bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh staf jurusan maupun akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang senantiasa memberikan pelayanan yang baik.
9. Orangtua tercinta, Ayahanda Abdul Wahid dan Ibunda Nurlayla. Saudara terkasih Sa'ary. Terima kasih atas segala dukungan, doa dan bantuan selama proses perkuliahan.

10. Para kerabat, Sahabat dan keluarga. Sahabat saya Roid Zamzami, Helmi Akhyar, Wonten, Muhammad Arhan dan Aida Cahyaning Putri. Sahabat perjuangan satu almamater Suwondo, Aris Munandar, Muhammad Adnan, Praja Habib Pasangka, Rusli, Sultan Perjaka, Muhammad Ilham Rokhim, dan kelompok belajar "Belajar Berani Mati". Terima kasih atas segala doa dan dukungan, serta pengalaman selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri.

Penulis menyadari adanya kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karenanya. Penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran guna perbaikan dalam skripsi ini di kemudian hari. Demikian, semoga skripsi ini memberi manfaat bagi pembaca dan penulis sendiri.

Samarinda, 5 Juni 2022

Penulis,



Juliansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.1 Manfaat Praktis	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Dasar Teori.....	6
2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah	6
2.1.2 Dasar Hukum Otonomi Daerah	6
2.1.3 Ruang Lingkup Otonomi Daerah.....	8
2.1.4 Tujuan dan Manfaat Otonomi Daerah.....	9
2.1.5 Penganggaran Sektor Publik.....	11
2.1.5.1 Pengertian Penganggaran Sektor Publik	11
2.1.5.2 Prinsip Penganggaran Sektor Publik.....	12

2.1.5.3 Siklus Anggaran Daerah	13
2.1.5.4 Fungsi Anggaran Sektor Publik.....	15
2.1.5.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	17
2.1.6 Kinerja Keuangan Daerah.....	18
2.1.6.1 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah.....	18
2.1.6.2 Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah.....	19
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Kerangka Konseptual.....	29
BAB III. METODE PENELITIAN	30
3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran	30
3.2 Objek Penelitian	30
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.3.1 Jenis Data.....	32
3.3.2 Sumber Data	32
3.4 Metode Pengumpulan Data	33
3.5 Analisis Data	33
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Paparan Data	36
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	36
4.1.2 Deskripsi Data.....	37
4.1.2.1 Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi kalimantan Timur	37
4.2 Hasil dan Pembahasan	42
4.2.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	43
4.2.2 Rasio Aktivitas	46
4.2.3 Rasio Pertumbuhan	51
4.2.4 Ekonomis	57
4.2.5 Efektivitas	59
4.2.6 Efisiensi	62
BAB V. PENUTUP.....	65
5.1 Kesimpulan	65

5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	63

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tingkat Kemandirian dan Kemampuan.....	20
Tabel 2.2 Penilaian Ekonomis	23
Tabel 2.3 Penilaian Efektivitas.....	23
Tabel 2.4 Penilaian Efisiensi	24
Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 2.6 Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 4.1 Pagu APBD Provinsi Kalimantan Timur	38
Tabel 4.2 Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Timur	40
Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Kemandirian	43
Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Belanja Rutin	47
Tabel 4.5 Perhitungan Rasio Belanja Pembangunan	49
Tabel 4.6 Perhitungan Rasio Pertumbuhan	52
Tabel 4.7 Perhitungan Tingkat Ekonomis.....	58
Tabel 4.8 Perhitungan Tingkat Efektivitas.....	60
Tabel 4.9 Perhitungan Tingkat Efisiensi.....	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Perkembangan Kemandirian	44
Gambar 4.2 Perkembangan Belanja Rutin	47
Gambar 4.3 Perkembangan Belanja Pembangunan	49
Gambar 4.4 Pertumbuhan PAD	53
Gambar 4.5 Perkembangan Pertumbuhan Belanja Rutin.....	55
Gambar 4.6 Perkembangan Pertumbuhan Belanja Pembangunan	56
Gambar 4.7 Perkembangan Tingkat Ekonomi	58
Gambar 4.8 Perkembangan Tingkat Efektivitas.....	61
Gambar 4.9 Perkembangan Tingkat Efisiensi	63

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Laporan Anggaran dan Realisasi 2015.....	71
Lampiran 2. Laporan Anggaran dan Realisasi 2016.....	72
Lampiran 2. Laporan Anggaran dan Realisasi 2017.....	73
Lampiran 2. Laporan Anggaran dan Realisasi 2018.....	74
Lampiran 2. Laporan Anggaran dan Realisasi 2019.....	75
Lampiran 2. Laporan Anggaran dan Realisasi 2020.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kinerja pemerintah daerah pada dasarnya mendapat perhatian khusus, salah satunya pemerintah pusat yang menyorotinya, hal tersebut juga dilakukan masyarakat sekitar karena berkaitan dengan manfaat yang akan diterima masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan. Kinerja di suatu pemerintahan daerah pada dasarnya bisa dipertanggungjawabkan, melihat bahwa pemerintah daerah bias memutuskan, dan berkewajiban untuk memiliki wewenang mengatur dan melakukan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat (UU No. 23 Tahun 2014). Sebagian besar pemerintah daerah melaksanakan kinerja dengan baik. Melalui departemen dalam negeri memberikan penghargaan bagi pemerintah daerah yang berprestasi sangat tinggi ketika menjalankan otonomi daerah dan hukuman bagi siapapun yang tidak dapat menjalankan otonomi daerah (PP No. 6 Tahun 2008). Tujuan pemberian penghargaan dan hukuman tidak lain adalah untuk meningkatkan kinerja maupun sepak terjang pemerintah daerah dalam mengelola APBD karena untuk sekarang ini peningkatan kinerja pemerintah daerah bukan lagi sebagai kewajiban namun sebagai kebutuhan.

Peningkatan kinerja seharusnya diiringi dengan pengukuran kinerja yang baik. Pengukuran kinerja bisa dikatakan suatu alat manajemen yang digunakan menambah kualitas kinerja pada pengambilan keputusan dalam penentuan

penganggaran maupun akuntabilitas dalam pengolahan data (Bastian, 2010:330). Masyarakat harus kritis dan selayaknya melakukan kegiatan berdasarkan target yang ditetapkan pada saat pelaksanaan perencanaan anggaran tahun sebelumnya. Pengukuran kinerja bias dikatakan cara menunjukkan akuntabilitas, maksudnya adalah cara keputusan maupun tindak pemerintah daerah dalam memberikan pertanggung jawabannya. Untuk penyajian, pelaporan dan pengungkapan segala aktivitas dan kegiatan yang telah tersusun di anggaran merupakan suatu cara mengukur kinerja pemerintah daerah dalam aspek keuangan.

Pengukuran kinerja aspek keuangan memiliki tujuan untuk menilai apakah aktivitas yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rancangan kerja untuk mencapai suatu kesuksesan yang telah dipersiapkan maupun ditujukan pada saat perencanaan. Disamping itu, kinerja sektor publik bersifat multi dimensional sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja. Hal ini dikarenakan *output* yang banyak dihasilkan berupa output tidak berwujud, sehingga pengukuran kinerja keuangan lebih baik dilakukan berdasarkan aspek keuangan guna mengetahui keadaan pada saat ini. Pengukuran kinerja berdasarkan aspek keuangan dilakukan dengan melihat historis keuangan. Pengukuran kinerja pada keuangan daerah sangat berbeda dengan perusahaan. Karena pemerintah daerah tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba, meskipun ada istilah surplus atau defisit untuk selisih pendapatan dan anggaran belanja pada pemerintah daerah.

Kelemahan pengukuran aspek keuangan hanya menitikberatkan pada pertanggungjawaban anggaran daerah dan terelaisasinya program atau kegiatan

tanpa harus mengungkapkan secara hasil atau manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat maupun pihak yang terkait lainnya.

Pemerintah daerah masih memiliki kekurangan dalam mengelola keuangan. Salah satunya penggunaan anggaran belanja daerah yang sangat tinggi yaitu mencapai 7 triliun sedangkan pendapatan belanja pertahun hanya dianggarkan 9 triliun sehingga perlunya menurunkan Belanja Rutin agar pembangunan untuk sarana dan prasarana berjalan secara merata dan hasilnya lebih cepat dirasakan oleh masyarakat. Kondisi seperti ini apabila tidak mendapatkan respon dari pemerintah daerah maka akan menimbulkan citra tidak baik untuk pemerintah daerah itu sendiri atau dengan kata lain masyarakat akan meragukan kemampuan kinerja pemerintah daerah. Penelitian terdahulu tentang pengukuran kinerja pemerintah daerah berdasarkan aspek keuangan lebih banyak dilakukan penelitian kinerja pemerintah daerah. Penelitian kinerja pemerintah daerah berdasarkan aspek keuangan dapat dilakukan menggunakan rasio keuangan daerah.

Pembagian daerah otonomi di Provinsi Kalimantan Timur terdiri 10 kecamatan dan 59 kelurahan dengan kode pos 75111 hingga 752352. Pada tahun 2021, jumlah kependudukan mencapai angka 766.015 jiwa dan untuk luas wilayahnya 783.000 km² dan sebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 978 jiwa/km². Kecamatan Samarinda Utara salah satu kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar mencapai luas wilayah lebih dari 31 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan di kecamatan Samarinda Kota menjadi kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil dari kecamatan lainnya.

Ditinjau dari rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah dan rata-rata pertumbuhan belanja daerah (belanja langsung dan belanja tidak langsung) diketahui bahwasanya pengukuran kinerja pada keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah dikatakan bagus. Namun, dilihat dari luas wilayah dan semakin banyak penduduk di Samarinda Pemerintah Daerah harus ekstra dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan, sehingga pemerataan pembangunan bukan hanya terpusat pada satu titik atau wilayah namun merata di semua wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan tugas pelayanan Pemerintah Samarinda terhadap masyarakat setempat melalui berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kualitas sangat baik. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN ASPEK KEUANGAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan melalui keterangan diatas maka rumusan masalahnya adalah “Bagaimana kinerja pemerintah samarinda ditinjau dari aspek keuangan”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada uraian diatas, tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan aspek keuangan”.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang terurai diatas, maka manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini menambah wawasan, pengetahuan dan berfikir kritis khususnya mengenai kinerja pemerintah daerah aspek keuangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada pemerintah daerah agar memperhatikan kinerjanya dengan melihat aspek keuangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah

Secara etimologi biasa dikatakan otonomi adalah Bahasa yang berasal dari Yunani yaitu auto, dan nomous. Auto memiliki arti tersendiri, sedangkan nomous memiliki arti yang disebut hukum atau peraturan. Keduanya digabungkan maka dapat diketahui arti dari otonomi daerah adalah aturan yang mengatur daerahnya sendiri. Otonomi Daerah bisa dikatakan adalah hak, dan kewajiban pada daerah otonomi yang berfungsi mengatur dan mengurus sendiri kewajiban pemerintahan dan urusan masyarakat sekitar dengan sistem negara kesatuan republik indonesia (UU No.23 Tahun 2014).

2.1.2 Dasar Hukum Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah dilandaskan oleh aturan hukum, hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat melaksanakan amanatnya dalam mengatur daerah masing-masing dengan baik dan dapat mempertanggungjawabkannya. Pemerintahan Daerah adalah kegiatan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan melalui dasar otonomi yang seluasnya dalam sistem dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti dimaksud dalam UUD 1945 (UU No. 23 Tahun 2014). Pemerintah daerah

terdiri dari gubernur, bupati, atau walikota, dan civitas daerah sebagai sumber penyelenggara pemerintahan daerah.

Pada dasarnya penetapan dasar kebijakan otonomi daerah adalah amandemen UUD 1945. Kebijakan otonomi daerah selalu berubah-ubah, dikarenakan kuatnya tarik menarik di kelompok elit politik pada masanya. Peraturan baru yang mengatur otonomi daerah, yaitu Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Dari peraturan-peraturan yang telah disebutkan diatas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa asas penting mengenai otonomi daerah yang harus dipahami.

Asas tersebut diantaranya:

1. Asas Desentralisasi

Asas Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintah yakni dari pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Asas Dekonsentrasi

Asas Dekonsentrasi merupakan pelimpahan dalam wewenang dan tanggungjawab dari pemerintah untuk gubernur yang bertugas sebagai wakil pemerintah di daerah.

3. Tugas Pembantuan

Merupakan penugasan kepada pemerintah kepada pemerintah daerah dan untuk desa. Tugas ini bisa dimulai dari pemerintah ke daerah kemudian dilanjutkan daerah ke desa untuk menjalankan tugas tertentu yaitu anggaran sarana dan prasarana hingga sumber daya pada manusia. Kewajiban dalam melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberi tugas.

Pertimbangan penentuan keuangan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka negara kesatuan yang meliputi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, adil dan transparan. Pemerataan harus melihat potensi, serta kebutuhan daerah dengan tanggungjawab dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan itu sendiri.

2.1.3 Ruang lingkup Otonomi Daerah

Pembagian ruang lingkup otonomi daerah dimaksudkan agar terdapat pembagian tugas dan wewenang yang baik dan benar sehingga tidak ada yang menyalahi aturan dalam menggunakan wewenangnya. Ruang lingkup otonomi daerah dapat dibagi menjadi tiga yaitu kewenangan daerah, kewenangan provinsi dan kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan daerah meliputi: (Bastian, 2010)

1. Kewenangan maksimum

Keseluruhan departemen bidang pemerintahan daerah kecuali tugas dan tanggungjawab di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama, serta kewenangan di bidang lain.

2. Kewenangan minimum

Pekerjaan umum, pendidikan kebudayaan pertanian, perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.

3. Kewenangan lainnya

a. Pengelolaan sumber daya nasional dan kelestarian lingkungan di wilayahnya.

b. Kewenangan di wilayah kelautan

c. Kepegawaian daerah yaitu kewenangan dalam menjalankan tugas pengangkatan, penetapan pensiun, gaji tunjangan dan kesejahteraan pegawai, serta menjalankan tugas pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerah.

2.1.4 Tujuan dan Manfaat Otonomi Daerah

Jika dilihat dari sudut pandang konseptual Indonesia yang menunjukkan bahwa Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yakni tujuan politik, tujuan administratif serta tujuan ekonomi, dari sudut pandang tersebut dapat diketahui bahwa:

1. Otonomi daerah sebagai upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik. Demokratisasi politik yang dimaksudkan disini adalah untuk partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
2. Otonomi daerah sebagai upaya untuk pembagian tugas dan urusan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah termasuk didalamnya adalah sumber keuangan serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan daerah

3. Melalui sistem otonomi daerah maka diharapkan akan terwujud peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah masing-masing secara merata dan adil
4. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah
5. Otonomi daerah dapat mengurangi kesenjangan antar daerah Otonomi daerah memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan pemerintahan.

Berikut beberapa manfaat otonomi daerah:

1. Otonomi daerah telah memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri sehingga mereka akan lebih leluasa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat
2. Otonomi daerah membuat pemerintahan daerah mengerti apa saja kebutuhan masyarakat yang tinggal didaerahnya serta dapat menggali potensi natural dan kultural sehingga dapat mengoptimalkan sumber pendanaan daerah
3. Otonomi daerah diharapkan dapat membuat pemerintah daerah, pemerintah pusat dan masyarakat agar siap dalam menghadapi tantangan globalisasi.
4. Memotong jalur birokrasi yang sedikit rumit dan prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat.
5. Meningkatkan kemampuan kerja pemerintahan pusat, pejabat pusat tidak lagi menjalankan tanggungjawab rutin ke daerah-daerah karena bisa diserahkan kepada pejabat daerah otonom.

6. Meningkatkan pengawasan kegiatan atau aktivitas yang dikerjakan oleh *elite* lokal, umumnya tidak simpatik dengan program pembangunan nasional dan tidak sensitif terhadap kebutuhan dari kalangan kurang mampu di suatu pedesaan.

2.1.5 Penganggaran Sektor Publik

2.1.5.1 Pengertian Penganggaran Sektor Publik

Anggaran adalah estimasi kinerja yang berisi paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi pada satu atau beberapa periode mendatang (Bastian, 2010:191). Anggaran selalu diikutkan data mengenai penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lampau.

Bagi organisasi sektor publik, penganggaran merupakan akuntabilitas atas pengelolaan dana publik disertai dengan program-program yang mendukung kegiatan publik dan dibiayai oleh dengan uang publik. Melalui proses pembuatan anggaran sektor publik harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena peraturan sering berubah, maka harus menyesuaikan dengan perubahan peraturan tersebut. Karakteristik anggaran yang baik terdiri dari: (Bastian, 2010:166)

- a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan maupun non keuangan
- b. Mencakup jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun anggaran
- c. Anggaran berisi komitmen manajemen untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan
- d. Usulan anggaran disetujui oleh bagian yang berwenang
- e. Anggaran yang disusun dapat diubah melalui kondisi tertentu

2.1.5.2 Prinsip Penganggaran Sektor Publik

Penyusunan anggaran bagi pemerintah daerah merupakan salah satu cara nasional dan internasional. Adapun prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam mengelola keuangan daerah yaitu:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti proses penganggaran harus benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dan dilaporkan kepada DPRD dan masyarakat. Anggota masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui proses anggaran namun juga memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban atas rencana dan pelaksanaan dari rencana tersebut apabila dirasa kurang memenuhi.

2. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan. Yang dimaksud disini adalah keterbukaan dalam proses penganggaran. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana proses penganggaran berlangsung dan memiliki akses yang sama untuk mengetahuinya karena hal tersebut menyangkut aspirasi dan kebutuhan dari kehidupan masyarakat. Salah satu cara penunjukan prinsip transparansi yaitu dengan meng-upload anggaran daerah di website daerah masing-masing.

3. Disiplin Anggaran

Perencanaan untuk pendapatan merupakan suatu rencana yang terukur yang dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Belanja yang dianggarkan pada setiap pos merupakan batas tertinggi pengeluaran

tidak dibenarkan bila mengerjakan proyek yang tidak ada anggarannya dalam APBD.

4. Keadilan Anggaran

Pemerintah daerah harus bisa adil dalam mengalokasikan anggarannya guna dapat pemeratakan kesejahteraan masyarakat, karena pada dasarnya anggaran tersebut didapatkan dengan peran serta masyarakat.

5. Demokratis

Dalam proses penetapan anggaran, baik yang berkaitan dengan pendapatan maupun pengeluaran harus mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat.

6. Bermoral Tinggi

Pengelolaan anggaran Negara harus berpedoman pada peraturan yang berlaku, etika, dan moral yang tinggi.

7. Berhati-hati

Dalam melakukan pengelolaan, Pemerintah Daerah harus berhati-hati dan memerlukan pemikiran yang matang dikarenakan jumlah sumber daya yang terbatas dan mahal harganya.

2.1.5.3 Siklus Anggaran Daerah

Prinsip-prinsip pokok dalam mengelola anggaran yang telah disebutkan diatas harus diimplementasikan pada siklus anggaran agar anggaran daerah dapat menjamin pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kepentingan publik. Siklus anggaran daerah meliputi lima tahap yaitu:

1. Tahap Perencanaan (*preparation*)

Tahap perencanaan melibatkan analisis perkembangan anggaran. Rincian proses penganggaran dapat berbeda-beda baik antar pemerintah daerah maupun dalam unit-unit yang ada pada suatu pemerintah daerah. Diperlukan kejujuran semua pihak penyusun anggaran. Untuk perencanaan pendapatan maka fungsi Dispenda sebagai koordinator harus diperankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. potensi yang didiskusikan pada tahap ini berapa besarnya target yang diusahakan dapat dicapai. Untuk perencanaan pengeluaran khususnya pengeluaran atau belanja pembangunan, maka diperlukan Bappeda untuk menjalankan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku.

2. Tahap ratifikasi (*budget ratification*)

Prinsip yang harus dipegang pada tahap ini adalah persiapan dan integritas yang tinggi. Pemerintah daerah yang terlibat dalam tahap ini harus memiliki kemampuan menjawab dan argumentasi yang tinggi. Ada pemisahan dua fungsi disini, yaitu pihak pemerintah daerah (eksekutif) sebagai pihak yang mengajukan anggaran dan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) sebagai pihak yang menyetujui maupun menolak anggaran yang diajukan pemerintah.

3. Pada tahap implementasi

Diperlukan adanya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Yang terpenting pada tahap ini adalah kebutuhan akan sistem dan prosedur implementasi yang memadai.

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi (*budget reporting and evaluation*)

Tahap pelaporan dan evaluasi merupakan tahap akhir dari siklus anggaran daerah. Hasil dari tahap ini adalah umpan balik yang menjadi masukan untuk perencanaan anggaran tahun berikutnya. Prinsip penting pada tahap evaluasi adalah harus jelas dan transparannya tolak ukur kinerja. Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan akuntabilitas. Jika pada tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan manajemen yang baik, maka pada tahap pelaporan dan evaluasi tidak akan menemui banyak masalah.

2.1.5.4 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik sangat penting dan memiliki beberapa fungsi.

Berikut adalah pentingnya anggaran sektor pulik:

1. Anggaran bertujuan untuk akuntabilitas publik maksudnya adalah untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap rakyatnya.
2. Anggaran bertujuan untuk mengarahkan pembangunan dibidang sosial, ekonomi, kesinambunga dan kualitas hidup masyarakat.
3. Ananggaran bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan dana karena keterbatasan sumber daya.

Penetapan anggaran merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk:

1. Perencanaan

Merencanakan tindakan yang dilakukan pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang didapatkan dari belanja pemerintah tersebut untuk mendukung kegiatan pembangunan jangka panjang dalam bentuk anggaran tahunan.

2. Pengendalian

Alat pengendalian, anggaran memberikan rencana secara jelas atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat diberikan kepada publik. Apabila penganggaran tidak ada, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan yang dikeluarkan melalui belanja.

3. Alat kebijakan fiskal

Anggaran digunakan pemerintah sebagai alat untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

4. Alat politik

Pada sektor publik, anggaran merupakan alat politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

5. Koordinasi dan komunikasi

Merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Disamping itu, anggaran publik juga sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif (Pemerintah Daerah).

6. Penilaian kinerja dan evaluasi

Kinerja eksekutif (pemerintah daerah) Dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja tiap kegiatan diukur dan dievaluasi secara periodik mengenai kesesuaian rencana kegiatan anggaran, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, dan mengevaluasi efisiensi serta efektivitasnya.

7. Motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis dalam mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.5.5 Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat dengan APBD yaitu rencana keuangan tahunan Daerah yang terpampang dengan Peraturan daerah (UU No. 23 Tahun 2014). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan penetapannya menggunakan peraturan daerah. APBD terdiri dari empat unsur yaitu Pendapatan, Belanja, Pembiayaan dan Transfer. Isi APBD menjelaskan tentang: (Halim, 2007:20)

1. Rencana kegiatan daerah beserta uraiannya secara rinci
2. Adanya target minimal sumber penerimaan untuk menutupi biaya atas aktivitas yang telah direncanakan dan batas maksimal untuk pengeluaran yang telah dilakukan.
3. Jenis kegiatan dan proyek dijelaskan dalam bentuk angka
4. Periode anggaran satu tahun

Proses pembuatan anggaran APBD pada dasarnya melibatkan tiga elemen penting yang saling berkaitan, yaitu masyarakat, DPRD dan pemerintah daerah. Substansi pokok dalam perencanaan APBD adalah peran dan fungsi dari DPRD dalam menentukan arah dan Kebijakan Umum APBD. Ketika melakukan perencanaan sebelum penyusunan APBD diperlukan kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat untuk memperoleh data dan informasi dari masyarakat untuk dijadikan

masukan. Penjaringan aspirasi masyarakat ini dilakukan oleh DPRD. Komunikasi dari ketiga elemen penting yaitu masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah sangatlah penting. Ada tahap yang harus dilalui oleh DPRD dalam menyusun strategi APBD, yaitu:

1. Melakukan proses penjaringan lingkungan untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan apa saja di daerah tersebut pada tahun tersebut.
2. Mempersiapkan arah dan kebijakan umum APBD dan strategi APBD
3. Meminta masukan dari pemerintah daerah
4. Membuat kesepakatan dengan pemerintah daerah

2.1.6 Kinerja Keuangan daerah

2.1.6.1 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian m/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi suatu organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi (Bastian, 2010:329). Bagi organisasi pencapaian prestasi yang baik sangatlah penting. Kinerja akan dikatakan berhasil apabila pencapaian prestasi telah sesuai dengan kriteria pencapaian yang telah ditentukan sebelumnya.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (PP No. 58 Tahun 2005). Kinerja keuangan daerah berarti tingkat prestasi yang dicapai oleh daerah dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

2.1.6.2 Pengukuran Kinerja keuangan

Pengukuran kinerja aspek keuangan pada Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara mengukur data atas keuangannya. Pada sektor Pemerintah Daerah, pengukuran secara keuangan dapat dilakukan dengan cara:

1. Analisis rasio

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya serta dengan membandingkan rasio keuangan daerahnya dengan rasio keuangan daerah terdekat guna mengetahui posisi rasio keuangannya (Halim, 2007:232). Rasio keuangan disusun untuk melayani pihak-pihak yang berkepentingan seperti DPRD sebagai wakil masyarakat, pihak eksekutif sebagai landasan dalam penyusunan APBD berikutnya, Pemerintah pusat yang membina pelaksanaan pengelolaan daerah dan masyarakat dan kreditur sebagai pihak yang ikut memiliki Pemerintah Daerah, yang bersedia memberi pinjaman maupun membeli obligasi. Beberapa rasio yang digunakan antara lain:

- a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Rasio Kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri atau bisa dikatakan mandiri dalam hal pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah serta pembiayaan kegiatan pemerintahan. Pengukurannya adalah dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan

$$\text{Rasio kkd} = \frac{\text{Total pendapatan asli daerah}}{\text{Bantuan pemerintah pusat dan pinjaman}} \times 100\%$$

daerah yang berasal dari sumber lain seperti pinjaman ataupun bantuan dari Pemerintah Pusat. Formula yang digunakan adalah: (Halim, 2008:232).

Semakin tinggi persentase rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal terutama pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah, disamping itu semakin tinggi persentase rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah dan sebaliknya mengacu pada UU No. 33 Tahun 2004, pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Tingkat Kemandirian dan Kemampuan

Kemandirian (%)	Kemampuan Daerah
0%-25%	<i>Instruktif</i> artinya peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah.
25%-50%	<i>Konsultatif</i> artinya campur tangan pemerintah pusat sudah mulai Berkurang
50%-75%	<i>Partisipatif</i> artinya peranan pemerintah pusat semakin berkurang
75%-100%	<i>Delegatif</i> artinya campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada

Sumber UU. No 33 Tahun 2004

b. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas menggambarkan cara Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya untuk belanja rutin dan belanja pembangunan dengan optimal. Formula yang digunakan adalah: (Halim, 2008:236)

$$\text{Rasio Aktivitas} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Bangunan}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Semakin tinggi persentase dana untuk belanja rutin maka persentase belanja pembangunan untuk sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

c. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan apa yang telah dicapainya dari periode ke periode. Setelah diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran maka dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian. Formula yang digunakan adalah: (Halim, 2008:241)

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD}_{t-(t-1)}}{\text{PAD}_{t-1}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Belanja Rutin} = \frac{\text{Belanja Rutin}_{t-(t-1)}}{\text{Belanja Rutin}_{t-1}} \times 100\%$$

$$\text{Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Belanja Pembangunan } t-(t-1)}{\text{Belanja Pembanguna } t-1} \times 100\%$$

Keterangan:

T =Tahun berjalan

t-1= Tahun sebelumnya

Semakin tinggi persentase pertumbuhan maka semakin bagus tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode.

2. *Value for money*

Value for money menjadi indikator pengukuran kinerja yang memberikan informasi anggaran yang dibelanjakan untuk menghasilkan nilai tertentu untuk masyarakatnya. Indikator yang dimaksud adalah:

a. Ekonomis (hemat cermat)

Ekonomis menyangkut biaya untuk memperoleh input. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimana cara Pemerintah Daerah dalam meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Formula yang digunakan adalah: (Mahsun, 2014)

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Biaya Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Biaya Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Kinerja Pemerintah Daerah dalam memungut pendapatan dikatakan ekonomis apabila rasio yang dicapai kurang dari 100%. Semakin kecil persentase rasio ekonomis maka semakin baik. Perinciannya dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2 Penilaian Ekonomis

Kinerja Keuangan	Kriteria
< 100%	Ekonomis
= 100%	Ekonomis Berimbang
> 100%	Tidak Ekonomis

Sumber: *Keppmendagri No. 600.900-327, 1996*

b. Efektivitas (berhasil guna)

Efektivitas menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Efektivitas tidak mengatakan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tersebut. Formula yang digunakan adalah: (Mahsun, 2014)

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dikatakan efektif rasio yang dicapai sebesar 100%, persentase rasio efektivitas menunjukkan kemampuan daerah yang semakin baik perinciannya dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Penilaian Efektivitas

% Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: *Keppmendagri No. 600.900-327, 1996*

c. Efisiensi (berdaya guna)

Efisiensi menggambarkan penggunaan sumber daya yang diminimalkan dan dengan hasil yang dimaksimalkan. Teknik analisisnya adalah: (Mahsun, 2014)

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kinerja Pemerintah Daerah dalam memperoleh pendapatan dikatakan efisien apabila persentase efisiensi yang dicapai kurang dari 100%. Semakin kecil persentase efisiensi maka semakin baik. Perinciannya dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 penilaian efisiensi

Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri No. 600.900-327, 1996

Beberapa hasil penelitian terdahulu tentang kinerja Pemerintah Daerah disajikan dalam bentuk tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Afriyanto dan Astuti	2012	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu	Deskriptif kuantitatif	Kemandirian keuangan kabupaten Rokan Hulu sangat rendah, efektivitas dan efisiensi PAD meningkat, belanja rutin lebih tinggi dari pada belanja pembangunan. Pertumbuhan APBD kabupaten Rokan Hulu fluktuatif.
2	Kurniati	2012	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Se-Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi 2008	Deskriptif kuantitatif	Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Se-Jawa Tengah berdasarkan rasio keuangan sesudah krisis ekonomi 2008 lebih rendah dibanding sebelum krisis ekonomi.

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Analisis Data	Hasil Penelitian
3	Sijabat, Saleh, dan Wachid	2013	Analisis Kinerja Keuangan Serta Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012)	Deskriptif kualitatif	Dilihat dari rasio keuangan, kinerja keuangan kota malang dari tahun 2008 hingga 2012 mengalami peningkatan.
4	Kalalo, Tinangon, dan Elim	2014	Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Manado	Deskriptif kuantitatif	Ketergantungan dengan pemerintah pusat cukup tinggi sehingga kemandirian keuangan kota Manado rendah. Disamping itu efektivitas PAD dan pajak daerah meningkat.

5.	Zikri, Zulbahridar, dan Ilham	2014	Analisis Kinerja Keuangan dan Non Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten	Deskriptif kualitatif	Kinerja keuangan kabupaten Kampar stabil. Dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
6.	Muhammad Safar Nasir	2019	Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah	Deskriptif kuantitatif	Kontribusi sumber PAD Kabupaten atau Kota dapat disimpulkan dari tahun anggaran 2007-2013 memiliki penerimaan kontribusi yang baik.
7.	Nuzulul Siswo Abdulazis	2021	Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kota Surabaya	Deskriptif kuantitatif	Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kota Surabaya diketahui telah mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik.

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa Afriyanto dan Astuti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu”, Kurniati dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Se-Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi 2008”, dan Kalalo, Tinangon, dan Elim dengan judul “Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Manado” menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rasio keuangan. Objek penelitian adalah Pemerintah Daerah dan menunjukkan hasil yang berbeda-beda sesuai dengan anggaran masing-masing.

Sijabat, Saleh, dan Wachid dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Keuangan Serta Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012)” dan Zikri, Zulbahridar, dan Ilham dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan dan Non Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar” menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan rasio keuangan. Objek yang diteliti adalah Pemerintah Daerah. Perbedaannya peneliti Zikri, Zulbahridar, dan Ilham menambahkan analisis non keuangan pada penelitiannya.

Muhammad Safa Nasir dengan judul penelitian “Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah setelah satu dekade Otonomi Daerah” menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Objek yang diteliti adalah pemerintah daerah Kota Surabaya. Nuzulul Siswo Abdulazis dengan judul “Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kota Surabaya”. Menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Objek yang diteliti pemerintah daerah Kota Surabaya. Perbedaannya dari Muhammad Safa Nasir adalah menggunakan variabel kontribusi dan efektivitas. Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, maka persamaan dan perbedaan penelitian ini dapat dilihat pada table 2.6

Tabel 2.6 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Indikator	Persamaan	Perbedaan
1	Objek Penelitian	-	Provinsi Kalimantan Timur
2	Analisis Data	Deskriptif Kuantitatif	Menambahkan <i>value for money</i>

Sumber: Data Diolah, 2022

Objek penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu Provinsi Kalimantan Timur Terdapat perbedaan pada analisis data yaitu menggunakan analisis kuantitatif deskriptif dengan menggunakan rasio keuangan untuk aspek keuangan.

2.3 Kerangka Konseptual

Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah diharapkan mampu bekerja secara professional dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mengetahui sampai sejauh mana kinerja yang dilakukan selama satu tahun anggaran, maka diperlukan adanya pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan aspek keuangan. Pengukuran kinerja ini mengacu pada data historis laporan keuangan daerah. Cara yang dilakukan adalah dengan menganalisis berdasarkan rasio keuangan yang terdiri dari rasio Kemandirian Keuangan Daerah, rasio Aktivitas, rasio Pertumbuhan dan menganalisis dengan konsep *value for money*. Baik analisis rasio keuangan maupun analisis dengan konsep *value for money* sama-sama mengacu pada realisasi dan anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Pengukurannya adalah dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti pinjaman ataupun bantuan dari Pemerintah Pusat. Formula yang digunakan adalah: (Halim, 2008:232).

$$\text{Rasio kkd} = \frac{\text{Total pendapatan asli daerah}}{\text{Bantuan pemerintah pusat dan pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio aktivitas menggambarkan memprioritaskan alokasi dananya untuk belanja rutin dan belanja pembangunan dengan optimal. Formula yang digunakan adalah: (Halim, 2008:236)

$$\text{Rasio Aktifitas} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Bangunan}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan apa yang telah dicapainya dari periode ke periode.

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD}_{t-(t-1)}}{\text{PAD}_{t-1}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Belanja Rutin} = \frac{\text{Belanja Rutin}_{t-(t-1)}}{\text{Belanja Rutin}_{t-1}} \times 100\%$$

$$\text{Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Belanja Pembangunan}_{t-(t-1)}}{\text{Belanja Pembangunan}_{t-1}} \times 100\%$$

Ekonomis menyangkut biaya yang digunakan agar memperoleh input. Sehingga menunjukkan bahwa bagaimana cara pemerintah daerah dalam meminimalkan biaya yang dikeluarkan

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Biaya Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Biaya Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Efektivitas menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Efektivitas tidak mengatakan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tersebut. Formula yang digunakan adalah: (Mahsun, 2014)

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Efisiensi menggambarkan penggunaan sumber daya untuk meminimalkan dan dengan hasil yang dimaksimalkan. Teknik analisisnya adalah: (Mahsun, 2014)

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2015-2020. Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dimaksud pada penelitian ini adalah kinerja dalam mengelola keuangan (aspek keuangan).

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu adalah data kuantitatif karena data yang dikumpulkan dalam bentuk angka-angka dari laporan keuangan daerah. Data kuantitatif adalah data keuangan provinsi Kalimantan Timur yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015-2020.

3.3.2 Sumber Data

Peneliti memilih menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder yaitu berupa data yang dimiliki secara tidak langsung dan melalui perantara yang dapat berupa bukti, atau laporan historis yang tersusun di bagian arsip yang dipublikasikan. Data sekunder pada penelitian ini berupa laporan historis yang telah tersusun dalam arsip dan dipublikasikan melalui website Provinsi Kalimantan Timur (bpkad.kaltimprov.go.id). Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (LRA APBD) Samarinda Kota tahun anggaran 2015-2020.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah terjadi dokumen dapat berbentuk tulisan, maupun gambar atau karya monumental dari seseorang. Data yang dikumpulkan peneliti dengan teknik dokumentasi. Berupa dokumen keuangan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA APBD) Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2015-2020. Data tersebut telah dipublikasikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sehingga peneliti memperoleh data tersebut dengan cara *men-download* di *website* Provinsi Kalimantan Timur (bpkad.kaltimprov.go.id)

3.5 Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dan dibaca oleh orang lain. Dalam proses analisis data, pertama kali yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data yang diperlukan yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA APBD). Pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

1. Aspek keuangan

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA APBD) Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2015-2020 dianalisis dengan menggunakan:

- a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Halim, 2008:232)

$$\text{Rasio kkd} = \frac{\text{Total pendapatan asli daerah}}{\text{Bantuan pemerintah pusat dan pinjaman}} \times 100\%$$

Semakin tinggi persentase rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa tingkat keinginan daerah terhadap pertolongan pihak eksternal pada pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah, disamping itu semakin tinggi persentase rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah dan sebaliknya. Penilaian dapat berpedoman pada UU No. 33 Tahun 2004, pada tabel 2.3 pada bab sebelumnya.

b. Rasio Aktivitas (Halim, 2008:236)

$$\text{Rasio Aktifitas} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Total Belanja Daerah Semakin tinggi persentase dana untuk belanja rutin maka persentase belanja pembangunan untuk sarana prasarana ekonomi masyarakat akan semakin kecil.

c. Rasio Pertumbuhan (Halim, 2008:241)

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD}_{t-(t-1)}}{\text{PAD}_{t-1}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Belanja Rutin} = \frac{\text{Belanja Rutin}_{t-(t-1)}}{\text{Belanja Rutin}_{t-1}} \times 100\%$$

$$\text{Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Belanja Pembangunan}_{t-(t-1)}}{\text{Belanja Pembanguna}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

t= tahun berjalan

t-1= tahun sebelumnya

Semakin tinggi persentase pertumbuhan maka semakin bagus tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode.

d. *Value For Money* (Mahsun, 2014):

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Biaya Belanja Daeran}} \times 100\%$$

Kinerja pemerintah daerah memungut pendapatan dikatakan ekonomis apabila rasio yang dicapai kurang dari 100%. Semakin kecil persentase rasio ekonomis maka semakin baik. Penilaian dapat berpedoman pada tabel 2.2 pada bab sebelumnya.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Target pendapatan kemampuan pemerintah daerah menjalankan tugasnya dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai sebesar 100%. Semakin tinggi persentase rasio efektivitas menunjuk kemampuan daerah yang semakin baik. Penilaian dapat berpedoman pada tabel 2.3 pada bab sebelumnya.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Realisasi pendapatan Kinerja Pemerintah Daerah dalam memperoleh pendapatan dikatakan efisien apabila persentase efisiensi yang dicapai kurang dari 100%. Semakin kecil persentase efisiensi maka semakin baik. Penilaian dapat dilihat pada table 2.4 pada bab sebelumnya

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.4 Paparan Data

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kalimantan Timur memiliki luas wilayah daratan 127.267,52 km² dan luas pengelolaan laut 25.656 km² terletak diantara 113°44' Bujur Timur dan 119°00' Bujur Timur serta diantara 2°33' Lintang Utara dan 2°25' Lintang Selatan. Kependudukan kalimantan timur tahun 2003 sebanyak 2.311.162 jiwa, pada tahun 2010 melalui hasil sensus penduduk dicapai angka 3.047.500 jiwa. Sehingga dalam kurun waktu tersebut jumlah penduduk kalimantan timur meningkat sebesar 736.338 jiwa, pertumbuhan penduduk tiap tahunnya rata-rata 3,60 persen.

Jumlah penduduk di tahun 2013 berjumlah 3.300.517 jiwa dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin terdiri dari penduduk laki-laki 1.731.820 jiwa (52,47 persen) dan penduduk perempuan 1.568.697 jiwa (47,53 persen). Berdasarkan administratif provinsi ini memiliki batas wilayah dibagian utara berbatasan dengan kalimantan utara, dan sebelah timur berbatasan dengan sebagian (12 Mil) Selat Makasar dan Laut Sulawesi, bagian selatan berbatasan dengan provinsi kalimantan selatan, sebelah barat berbatasan dengan provinsi kalimantan tengah dan provinsi kalimantan barat serta Negara Bagian Serawak Malaysia Timur.

4.1.2 Deskripsi Data

4.1.2.1 Data Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat membantu dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah khususnya untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Terlaksananya kegiatan tersebut dengan baik merupakan kepuasan sendiri bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah. Samarinda merupakan salah satu daerah otonomi di Kalimantan Timur yang merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan. Jumlah penduduk yang semakin banyak tiap tahunnya membuat Pemerintah Daerah harus lebih baik lagi dalam menyusun dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengetahui tugas keuangan pemerintah daerah baik atau tidak, maka pengukuran kinerja keuangan harus dilakukan. Data yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Tahun 2015-2020. Rincian Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel 4.1, sedangkan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.1 PAGU APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2020

No	Uraian	Anggaran			
		2015	2016	2017	2018
A	PENDAPATAN	10.497.631.453.406.	7.752.674.455.112	8.233.730.774.720	9.591.235.184.518
1.	PAD	5.096.145.980.601	3.921.364.868.075	4.167.589.517.079	5.129.056.874.576
2.	Pendapatan transfer	5.387.930.606.704	3.818.127.539.435	4.047.511.428.349	4.449.907.091.175
3.	Lain-lain pendapatan PAD yang sah	862.342.181.701	794.051.975.000	660.553.474.696	892.960.031.576
B	BELANJA	7.052.533.847.969	5.649.687.263.500	6.009.766.572.310	7.923.012.819.323
1.	Belanja operasi	4.667.140.811.076	3.990.432.128.555	4.984.215.317.185	4.945.611.450.932
2.	Belanja modal	2.347.393.036.892	1.646.255.134.945	1.019.251.255.125	2.071.096.668.390
3.	Belanja tak terduga	18.000.000.000	13.000.000.000	6.300.000.000	6.333.900.000
4.	Transfer	4.431.726.152.030	2.339.671.736.500	2.825.130.802.690	2.185.767.980.677
C	PEMBIAYAAN				
1.	Penerimaan daerah	1.036.628.546.594	226.681.020.887	611.166.600.279	541.261.815.181
2.	Pengeluaran daerah	50.000.000.000	0	0	3.600.000.000

Tabel 4.1 Lanjutan

No	Uraian	Anggaran	
		2019	2020
A	PENDAPATAN	11.137.939.464.362	8.607.455.838.176
1.	PAD	5.797.714.345.762	4.326.324.617.227
2.	Pendapatan transfer	5.330.833.100.600	4.269.870.407.949
3.	Lain-lain pendapatan PAD yang sah	908.762.600.498	787.386.334.929
B	BELANJA	7.790.411.761.586	7.196.838.629.833
1.	Belanja operasi	5.940.390.533.457	5.365.251.220.104
2.	Belanja modal	1.825.021.288.128	1.331.587.409.728
3.	Belanja tak terduga	25.000.000.000	500.000.000.000
4.	Transfer	5.109.588.238.413	3.510.011.372.818
C	PEMBIAYAAN		
1.	Penerimaan Daerah	1.862.060.553.637	2.249.394.164.474
2.	Pengeluaran Daerah	100.000.000.000	150.000.000.000

Tabel 4.2 Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2020

No	Uraian	Realisasi			
		2015	2016	2017	2018
A	PENDAPATAN	9.464.926.706.876	7.985.727.918.251	8.158.103.650.157	10.669.542.801.846
1.	PAD	4.950.160.613.906	4.029.364.843.886	4.588.751.727.469	5.800.270.285.105
2.	Pendapatan transfer	4.503.361.198.970	3.945.525.961.355	3.555.558.173.688	4.853.761.786.447
3.	Lain-lain pendapatan PAD yang sah	951.602.831.867	715.292.747.242	857.707.147.709	856.317.290.881
B	BELANJA	6.388.107.684.363	5.293.741.507.697	5.446.410.626.566	6.219.052.604.351
1.	Belanja operasi	4.377.542.629.189	3.720.676.880.409	4.508.054.941.929	4.118.391.950.866
2.	Belanja modal	2.007.130.809.495	1.571.914.627.287	938.338.759.236	1.829.259.943.292
3.	Belanja tak terduga	3.434.245.678	1.250.000.000	16.925.400	353.710.393
4.	Transfer	3.817.234.609.849	2.307.500.831.162	2.781.546.332.856	3.097.001.159.339
C	PEMBIAYAAN				
1.	Penerimaan daerah	1.036.628.546.594	226.681.020.887	611.118.124.746	541.254.815.192
2.	Pengeluaran daerah	50.000.000.000	0	0	3.800.000.000
3.	SILPA	246.212.958.258	611.166.600.279	541.264.815.481	1.862.060.553.637

Tabel 4.2 Lanjutan

No	Uraian	Realisasi	
		2019	2020
A	PENDAPATAN	11.775.086.446.200	10.133.115.629.661
1.	PAD	6.555.852.805.408	5.289.232.781.584
2.	Pendapatan transfer	5.204.311.550.792	4.831.866.273.077
3.	Lain-lain pendapatan PAD yang sah	1.152.458.049.509	1.268.058.595.759
B	BELANJA	6.488.288.331.289	5.917.231.922.644.
1.	Belanja operasi	5.279.509.080.054	4.624.449.956.327
2.	Belanja modal	1.207.815.521.798	1.066.605.762.730
3.	Belanja tak terduga	903.729.437	226.176.203.586
4.	Transfer	4.889.390.178.060	3.411.272.539.834
C	PEMBIAYAAN		
1.	Penerimaan Daerah	1.862.060.553.637	2.249.383.814.348
2.	Pengeluaran Daerah	100.000.000.000	100.000.000.000

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui pagu anggaran pendapatan Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2015-2020 cenderung naik namun adanya penurunan di tahun terakhir, karena didukung dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah yang bagus. Pagu anggaran belanja daerah dari tahun 2015-2020 bersifat fluktuatif, namun apabila dibandingkan antara belanja rutin dengan belanja pembangunan lebih didominasi oleh belanja rutin. Pagu anggaran pembiayaan tahun 2015-2020 juga bersifat fluktuatif.

Realisasi APBD pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa pos pendapatan dan belanja daerah dari tahun 2015-2020 naik, hanya pos pembiayaan yang masih bersifat fluktuatif. Pada pos belanja daerah antara belanja rutin dan belanja pembangunan masih didominasi oleh belanja rutin. Jika dibandingkan antara pagu APBD dengan realisasi APBD, nilai realisasi lebih kecil dari nilai pagu sehingga menimbulkan adanya SILPA tiap tahunnya. SILPA yang ada pada tahun 2015 akan masuk pada anggaran tahun selanjutnya (2019) pada pembiayaan pos penerimaan daerah, begitu juga untuk tahun-tahun selanjutnya.

4.2 Hasil dan Pembahasan

4.2.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menunjukkan kemampuan kerja pemerintah daerah untuk membiayai sendiri atau bisa dikatakan mandiri dalam pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2012:232). rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan besarnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pembangunan terutama membayar pajak dan retribusi merupakan dasar utama Pendapatan Asli Daerah. Disamping itu, rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan ketergantungan daerah terhadap dana eksternal seperti bantuan Pemerintah Pusat, bantuan Pemerintah Provinsi, dan pinjaman. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan semakin besar keterlibatan masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi. Masyarakat yang mampu berpartisipasi dengan baik dalam membayar pajak dan retribusi, menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat tinggi. Disamping itu, semakin tinggi rasio Kemandirian

Keuangan Daerah menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana eksternal. Untuk menilai tinggi rendahnya kemandirian daerah juga dapat mengacu pada UU No. 33 Tahun 2004, pada tabel 2.3 pada bab II. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dihitung menggunakan rumus berikut : (Halim, 2008:232).

$$\text{Rasio kkd} = \frac{\text{Total pendapatan asli daerah}}{\text{Bantuan pemerintah pusat dan pinjaman}} \times 100\%$$

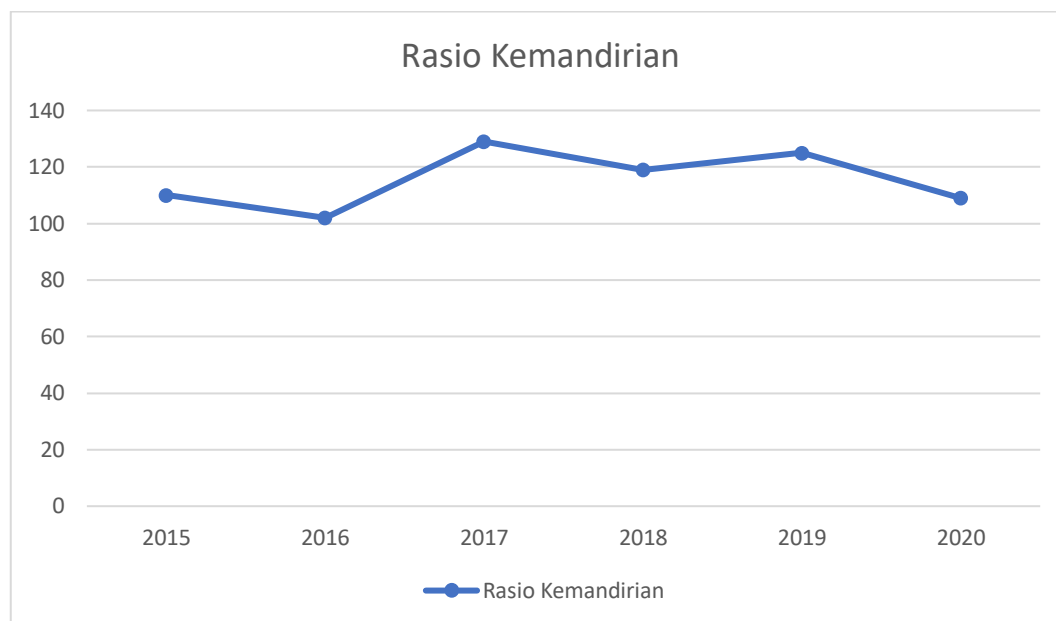
Hasil perhitungan rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi (Rp)	Rasio Kemandirian %
2015	4.950.160.613.906	4.503.361.198.970	110
2016	4.029.364.843.886	3.945.525.961.355	102
2017	4.588.751.727.469	3.555.558.173.688	129
2018	5.800.270.285.105	4.853.761.786.447	119
2019	6.555.852.805.408	5.204.311.550.792	125
2020	5.289.232.781.584	4.831.866.273.077	109

Sumber : Data diolah 2022

Perkembangan rasio Kemandirian Keuangan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015- 2020 dapat dilihat pada gambar 4.1



GAMBAR 4.1 PERKEMBANGAN KEMANDIRIAN KEUANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015-2020

Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa tingkat Kemandirian Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan dan penurunan, hanya saja pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 8% tahun 2016 menjadi 27% di tahun 2017. Pada tahun 2018 kemandirian Provinsi Kalimantan Timur menurun menjadi 10%. Dan meningkat kembali di tahun 2019 sebesar 6% dan terjadi penurunan kembali di tahun 2020 sebesar 16%. Persentase rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2015-2020 selalu berada di atas 10% ini menunjukkan hubungan delegatif artinya campur tangan pemerintah pusat masih ada. Disamping itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah berhasil dalam membiayai sendiri pembangunan dan pelayanan. Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi sangat tinggi sehingga menunjukkan kesejahteraan masyarakat tinggi.

Adanya penurunan pada tahun 2015-2016, setelah dilihat dari segi laporan

realisasi provinsi Kalimantan Timur, terdapat beberapa penurunan yang terjadi pada akun pendapatan pajak daerah sebesar 16% dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 27% sehingga menyebabkan tingkat kemandirian juga ikut mengalami penurunan pada tahun tersebut.

Pendapatan pajak daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah mengalami penurunan salah satu penyebabnya yaitu pemerintah daerah belum mampu mengidentifikasi sumber pendapatannya dan juga sebagian besar pemerintah belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Pada tahun 2016-2017 tingkat kemandirian mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang disebabkan oleh pendapatan pajak daerah yang naik sebesar 12% dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah naik sebesar 24%, dilihat dari laporan realisasi provinsi Kalimantan Timur. Diikuti dengan bantuan pemerintah pusat yang mengalami penurunan. Dan pada tahun 2018-2019 Tingkat kemandirian kembali mengalami kenaikan yang tidak signifikan, yang disebabkan oleh pendapatan pajak daerah naik sebesar 5% dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah naik sebesar 49%. Maka dari itu semakin kecil bantuan pemerintah pusat dan semakin besar pendapatan daerah maka tingkat kemandirian semakin tinggi, oleh karena itu dapat dikatakan *delegatif* yaitu campur tangan pemerintah sudah tidak ada, yang dapat dilihat dari ukuran tabel kemandirian 2.1 di bab 2.

Adanya kenaikan dari beberapa akun sebelumnya menunjukkan sebagian besar pemerintah mulai mampu untuk mengidentifikasi sumber pendapatannya dan mampu mengoptimalkan sumber pendapatan pajaknya.

Pada tahun 2017-2018 tingkat kemandirian kembali mengalami penurunan yang disebabkan bantuan pemerintah pusat mengalami kenaikan sebesar 37% yang berdampak pada turunnya tingkat kemandirian. Dikarenakan bantuan pemerintah pusat ini salah satu penentu naik atau turunnya tingkat kemandirian suatu daerah.

Pada tahun 2019-2020 Tingkat kemandirian juga mengalami penurunan yang cukup signifikan yang terjadi karena pendapatan pajak daerah turun sebesar 22%, retribusi daerah turun sebesar 63% dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan turun sebesar 71%. Yang mempengaruhi tingkat kemandirian sehingga mengalami penurunan. Dikarenakan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya, juga salah satu penentu naik dan turunnya tingkat kemandirian suatu daerah.

4.2.2 Rasio Aktivitas

Menggambarkan cara memprioritaskan pengalokasian dananya untuk belanja rutin dan belanja pembangunan dengan optimal. Semakin tinggi *presentase* belanja rutin atau belanja operasi menunjukkan semakin rendah belanja pembangunan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat. Rasio aktivitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut: (Halim, 2008:236)

$$\text{Rasio Aktifitas} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

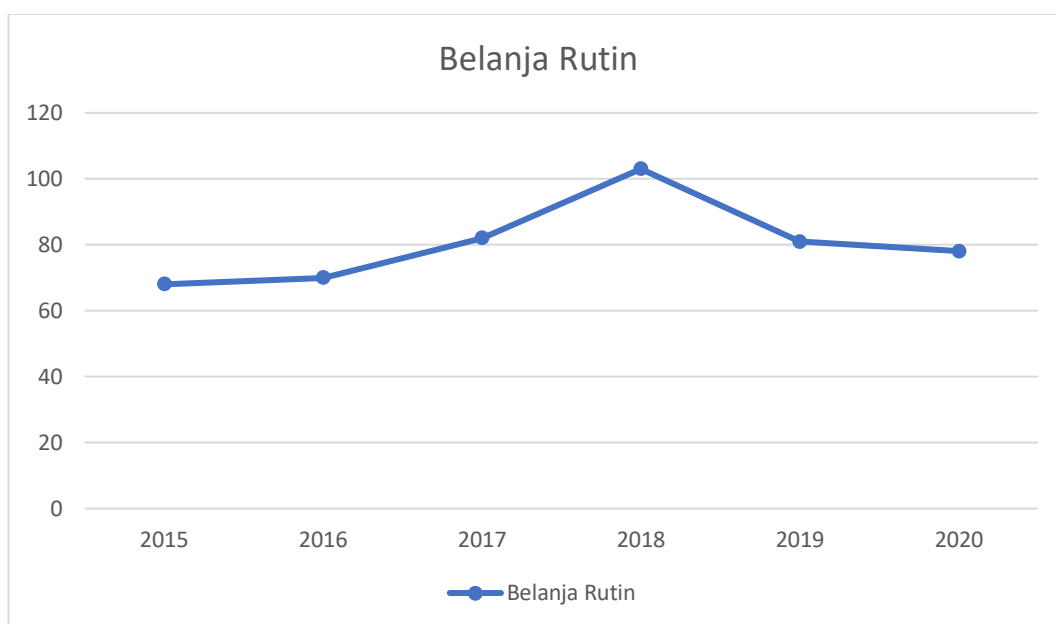
$$\text{Rasio Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Bangunan}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio Belanja Rutin Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Belanja Rutin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2020

Tahun	Total Belanja Rutin (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio Aktivitas (%)
2015	4.377.542.629.189	6.388.107.684.363	68
2016	3.720.676.880.400	5.293.741.507.697	70
2017	4.508.054.941.929	5.446.410.626.566	82
2018	4.118.391.950.866	6.219.052.604.351	103
2019	5.279.509.080.054	6.488.288.331.289	81
2020	4.624.449.956.327	5.917.231.922.644	78

Sumber : Data diolah 2022



GAMBAR 4.2 PERKEMBANGAN BELANJA RUTIN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015-2020

Sumber : Data Diolah 2022

Berdasarkan perhitungan gambar 4.2 menunjukkan bahwa rata-rata aktivitas belanja rutin Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 80,33%. Aktivitas belanja rutin atau belanja operasi dari tahun 2015-2020 cenderung meningkat. Pada tahun 2015 persentase aktivitas belanja operasi sebesar 68% naik menjadi 70% pada

tahun 2016 dan pada tahun 2017 persentase aktivitas belanja rutin meningkat kembali menjadi 82%. Dan terjadi peningkatan pada tahun 2018 yakni sebesar 103%. Namun 2 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 22% dan 3% pada tahun 2019 dan 2020.

Hasil perhitungan rasio Belanja Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel 4.5.

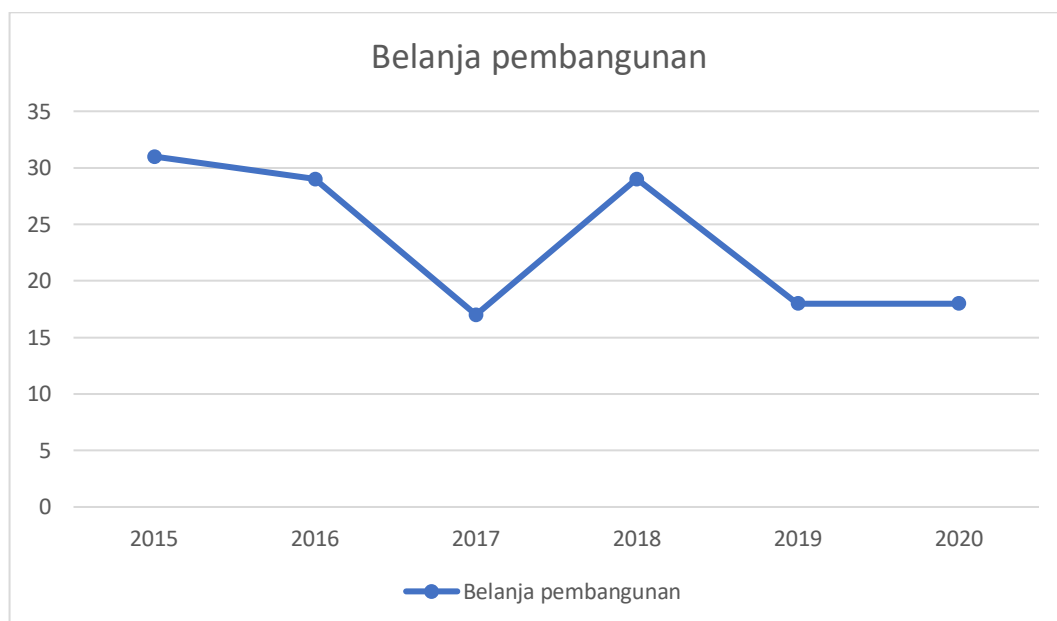
Pada tahun 2015-2018 rasio aktivitas cenderung mengalami kenaikan disebabkan oleh belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial yang lebih tinggi dibandingkan belanja modal yang lebih kecil disetiap tahunnya, dan pemerintah lebih memprioritaskan belanja rutin dibandingkan dengan belanja modal, sehingga dapat dikatakan pemerintah daerah belum mampu mengalokasikan dananya untuk investasi atau belanja modal. Dan mempengaruhi sarana prasarana, infrastruktur, yang tidak merata sehingga tidak dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pada tahun 2019-2020 rasio aktivitas dapat kita lihat mengalami penurunan yang disebabkan belanja modal mengalami penurunan sebesar 11% dan yang termasuk dalam belanja operasi masih bisa dikatakan lebih tinggi sehingga penurunannya tidak terlalu signifikan.

Tabel 4.5 Perhitungan Rasio Belanja Pembangunan Kota Provinsi Kalimantan Timur**Tahun 2015-2020**

Tahun	Total Belanja Pembangunan (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio Aktivitas (%)
2015	2.007.130.809.495	6.388.107.684.363	31,41
2016	1.571.914.627.287	5.293.741.507.697	29,69
2017	938.338.759.236	5.446.410.626.566	17,22
2018	1.829.259.943.292	6.219.052.604.351	29,41
2019	1.207.815.521.798	6.488.288.331.289	18,61
2020	1.066.605.762.730	5.917.231.922.644	18,02

Sumber : Data Diolah 2022

**GAMBAR 4.3 PERKEMBANGAN BELANJA PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015-2020**

Berdasarkan gambar 4.3 dapat diketahui bahwa rata-rata aktivitas belanja pembangunan sebesar 26,93%. Aktivitas belanja pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur cenderung naik turun pada tahun 2015-2020. Pada tahun 2015 persentase aktivitas belanja pembangunan sebesar 31,41% turun sebesar 1,72% menjadi 29,69% pada tahun 2016. Pada tahun 2017 persentase aktivitas belanja mengalami penurunan kembali 12,47% menjadi 17,22%. Namun aktivitas

belanja pembangunan meningkat drastis pada tahun 2018 menjadi 29,41%. Hingga dititik 2 tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan sebesar 10,8% dan 0.59% pada tahun 2019 dan 2020.

Perbandingan rata-rata aktivitas belanja rutin dan belanja pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berbeda jauh. Rata-rata presentase belanja rutin lebih besar dibandingkan persentase belanja pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilihat dari rasio aktivitas kurang baik karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur lebih memprioritaskan alokasi dana untuk belanja rutin daripada belanja pembangunan. Sehingga semakin rendah belanja pembangunan untuk membangun sarana dan prasarana bagi masyarakat.

Pada tahun 2015-2017 rasio belanja pembangunan mengalami penurunan disebabkan oleh salah satu belanja modal tanah mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar 98% dan belanja pegawai naik sebesar 66% sehingga diikuti penurunan pada rasio aktivitas tersebut.

Pada tahun 2017-2018 rasio belanja pembangunan mengalami kenaikan disebabkan oleh salah satu akun yaitu belanja modal tanah mengalami kenaikan 127% dan belanja pegawai naik 3%. Sehingga diikuti kenaikan pada rasio aktivitas tersebut.

Pada tahun 2018-2020 kembali mengalami penurunan terjadi karena adanya salah satu akun belanja modal tanah mengalami penurunan sebesar 33% dan belanja pegawai naik sebesar 12% sehingga rasio aktivitas pada gambar mengalami penurunan.

Rasio aktivitas mengalami penurunan maka dapat dipastikan belanja pembangunan lebih rendah dibandingkan belanja rutin atau belanja operasi disebabkan karena pemerintah belum mampu mengalokasikan dananya secara optimal.

4.2.3 Rasio Pertumbuhan

Menggambarkan kemampuan pemerintah daerah mempertahankan dan meningkatkan apa yang telah dicapainya dari periode ke periode. Setelah diketahuinya komponen sumber daya pendapatan dan pengeluaran maka dapat digunakan sebagai mengevaluasi potensi potensi yang perlu mendapat perhatian.

Rasio pertumbuhan dapat dihitung dengan rumus berikut:(Halim, 2008:241)

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD}_{t-(t-1)}}{\text{PAD } t-1} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Belanja Rutin} = \frac{\text{Belanja Rutin } t-(t-1)}{\text{Belanja Rutin } t-1} \times 100\%$$

$$\text{Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Belanja Pembangunan } t-(t-1)}{\text{Belanja Pembanguna } t-1} \times 100\%$$

Keterangan :

t= tahun berjalan

t-1 = tahun sebelumnya

Hasil perhitungan rasio Pertumbuhan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015-2020

Tabel 4.6 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-**2020**

Keterangan	2015	2016	2017	2018
PAD	4.950.160.613.906	4.029.364.843.886	4.588.751.727.469	5.800.270.285.105
Pertumbuhan PAD (%)		-18	13,88	26,40
Belanja rutin	4.377.542.629.189	3.720.676.880.409	4.508.054.941.929	4.118.391.950.866
Pertumbuhan belanja rutin(%)		-15	21,16	-9
Belanja Pembangunan	2.007.130.809.495	1.571.914.627.287	938.338.759.236	1.829.259.943.292
Pertumbuhan belanja pembangunan(%)		-22	-40,3	95

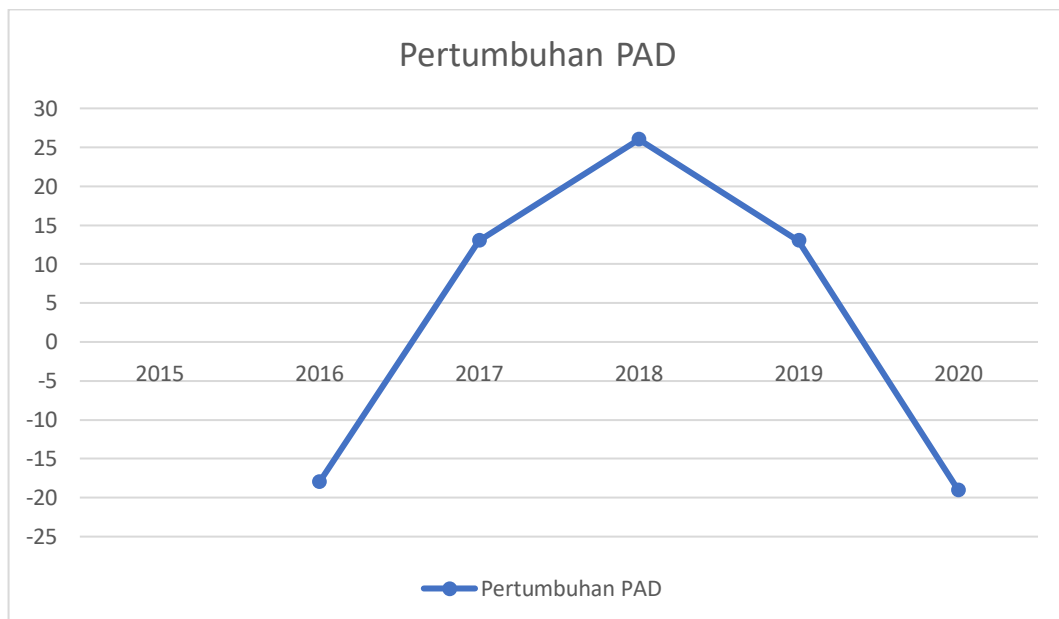
Sumber. Data diolah 2022

Tabel 4.6 Lanjutan

Keterangan	2019	2020
PAD	6.555.852.805.408	5.289.232.781.584
Pertumbuhan PAD (%)	13	-19
Belanja rutin	5.279.509.080.054	4.624.449.956.327
Pertumbuhan belanja rutin(%)	28	-12
Belanja Pembangunan	1.207.815.521.798	1.066.605.762.730
Pertumbuhan belanja pembangunan(%)	33	-11-

Perkembangan rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan

Timur tahun 2015-2020 dapat dilihat pada gambar 4.4



Gambar 4.4 Pertumbuhan PAD Provinsi Kalimantan Timur 2015-2020

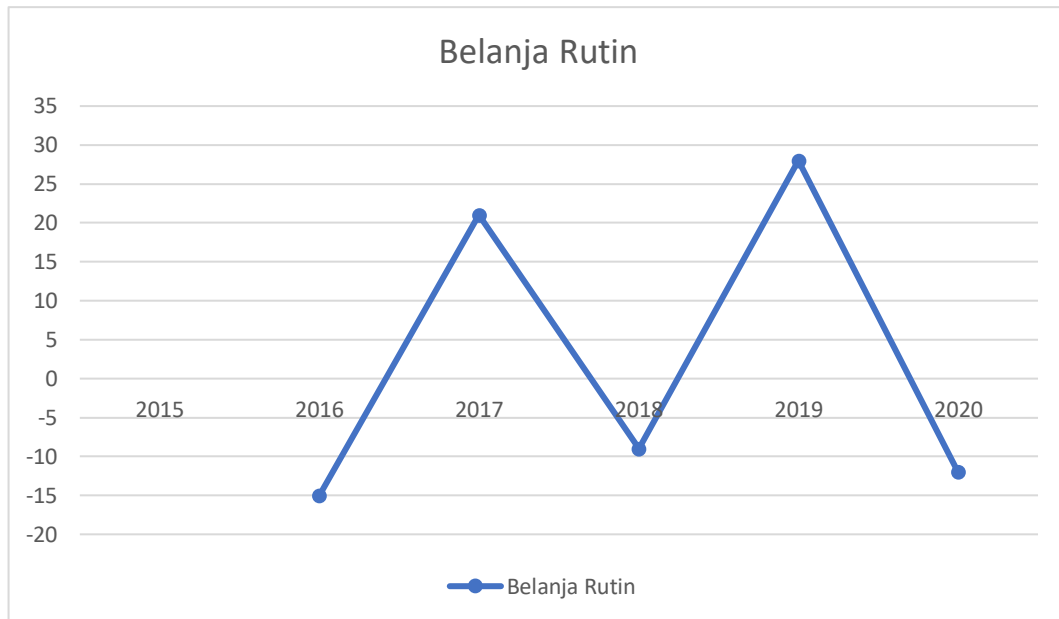
Berdasarkan gambar 4.4 menunjukkan bahwa rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur meningkat dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah minus sebesar -18% dan naik

menjadi 13,88% pada tahun 2017. Tahun 2018 pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah meningkat kembali menjadi 26,40% dan ditahun 2019 mengalami penurunan sebesar 13,40% dan disusul penurunan drastis di tahun 2020 yaitu -19% . Kenaikan rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum berhasil dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah. Perkembangan rasio Pertumbuhan Belanja Rutin Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015-2020 dapat dilihat pada gambar 4.5.

Pada tahun 2015-2016 pertumbuhan pendapatan asli daerah mengalami penurunan disebabkan oleh salah satu akun pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah juga mengalami penurunan sebesar 27%, yang disebabkan karena adanya penurunan pada laba, deviden dan penjualan saham milik daerah.

Pada tahun 2017-2018 pertumbuhan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan yang disebabkan oleh salah satu akun pendapatan pajak daerah juga mengalami kenaikan sebesar 34%, yang disebabkan karena adanya kesadaran diri dari wajib pajak atau mekanisme penagihan pajak yang dilakukan pemerintah secara optimal.

Pada tahun 2019-2020 pertumbuhan pendapatan asli daerah kembali mengalami penurunan yang disebabkan oleh salah satu akun pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan turun sebesar 71% dan pendapatan pajak daerah turun sebesar 21%.



Gambar 4.5 PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN BELANJA RUTIN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015-2020

Sumber : Data Diolah

Pertumbuhan belanja rutin atau belanja operasi Provinsi Kalimantan Timur telah mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2015-2020. Pada tahun 2016 pertumbuhan belanja rutin menurun sebesar -15% dan meningkat sebesar 21,16% pada tahun 2017. Pada tahun 2017 pertumbuhan belanja rutin Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan kembali sebesar -9%. Dan mengalami kenaikan sebesar 37% dan terjadi penurunan kembali di tahun terakhir 2020 yaitu 40%.

Pada tahun 2016-2020 pertumbuhan belanja rutin mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan disebabkan beberapa akun belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial juga mengalami kenaikan dan penurunan. Sehingga mempengaruhi naik dan turunnya pertumbuhan belanja rutin.



GAMBAR 4.6 PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN BELANJA PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015-2020

Pertumbuhan belanja pembangunan Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami penurunan pada tahun 2015-2020 persentase pertumbuhan belanja pembangunan sebesar 32,7% dan tahun 2016 menurun menjadi -22%. Penurunan drastis terjadi pada tahun 2017 dengan persentase pertumbuhan sebesar -40,3% dan mengalami kenaikan drastis menjadi 95% pada tahun 2018 dan tahun 2019 menjadi 33% diteruskan dengan penurunan sebesar 44% di tahun 2020 menjadikan -11%.

Pada tahun 2016-2017 pertumbuhan belanja pembangunan mengalami penurunan yang disebabkan juga karena adanya penurunan, pada belanja modal tanah turun sebesar 98%, belanja modal jalan turun sebesar 48%. Tahun 2018 pertumbuhan belanja pembangunan mengalami kenaikan yang disebabkan juga karena adanya kenaikan pada belanja modal tanah naik sebesar 127%, belanja modal peralatan naik sebesar 20% dan belanja modal jalan naik sebesar 132%.

Pertumbuhan belanja pembangunan kembali mengalami penurunan pada tahun 2019-2020 disebabkan juga karena adanya penurunan pada belanja modal gedung sebesar 17% dan belanja modal jalan sebesar 31%.

Jika dibandingkan antara pertumbuhan belanja rutin dengan belanja pembangunan, maka didapatkan bahwa belanja pembangunan sangat tidak stabil dengan mengalami banyak penurunan, sedangkan belanja rutin mengalami penurunan yang drastis namun ditutup dengan kenaikan yang bagus ditahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kurang baik dilihat dari rasio pertumbuhan belanja rutin dan belanja pembangunan karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kurang dalam mengalokasikan dana untuk sarana dan prasarana publik untuk masyarakat dan lebih banyak mengalokasikan dana untuk kepentingan pemerintahan.

4.2.4 Ekonomis

Ekonomis menunjukkan bagaimana cara meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Kinerja pemerintah daerah dalam memungut pendapatan dikatakan ekonomis apabila rasio yang mencapai kurang dari 100%. Semakin kecil persentase rasio ekonomis maka semakin baik. Untuk menilai tinggi rendahnya tingkat ekonomis daerah dapat mengacu pada tabel 2.2 pada bab II.

Tingkat ekonomis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dihitung menggunakan rumus berikut: (Mahsun, 2014)

Ekonomis

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Biaya Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Biaya Belanja Daerah}} \times 100\%$$

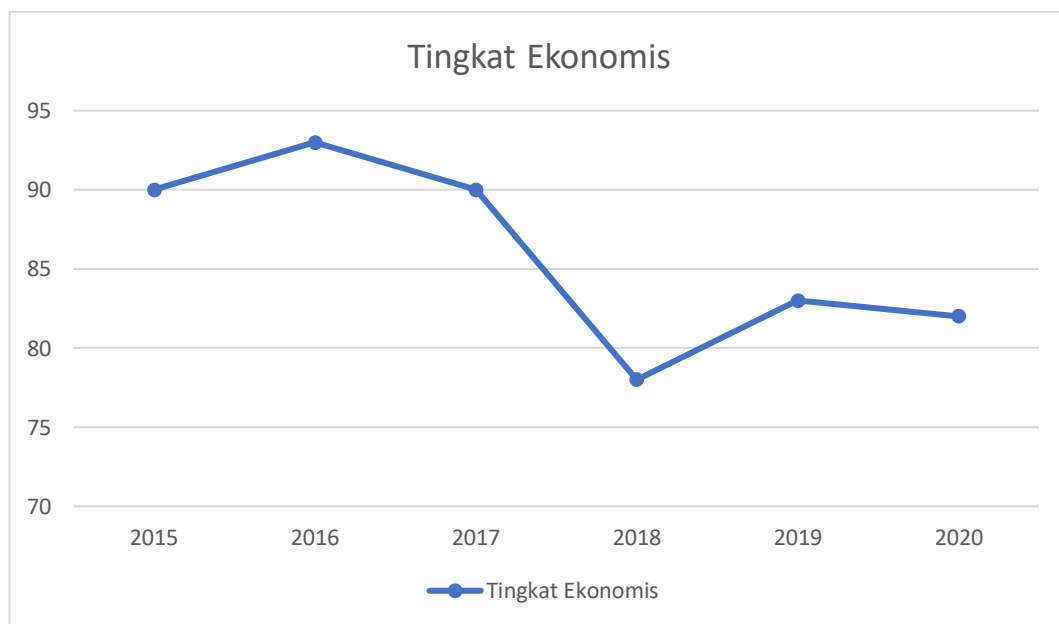
Hasil perhitungan tingkat dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7 Perhitungan Tingkat Ekonomis Provinsi Kalimantan Timur

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Anggaran Belanja Daerah (Rp)	Ekonomis (%)	Keterangan
2015	6.388.107.684.363	7.052.533.847.969	90	Ekonomis
2016	5.293.741.507.697	5.649.687.263.500	93	Ekonomis
2017	5.446.410.626.566	6.009.766.572.310	90	Ekonomis
2018	6.219.052.604.351	7.923.012.819.323	78	Ekonomis
2019	6.488.288.331.289	7.790.411.761.586	83	Ekonomis
2020	5.917.231.922.644	7.196.838.629.833	82	Ekonomis

Sumber : Data diolah

Perkembangan Tingkat Ekonomis Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015-2020 dapat dilihat pada gambar 4.7.



Gambar 4.7 Perkembangan Tingkat Ekonomis Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2020

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan gambar 4.7, maka dapat diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja dikatakan ekonomis karena persentase tingkat ekonomis kurang dari 100%. Pengelolaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat ekonomis karena dari tahun 2015-2020 terdapat dibawah 100%.

Pada tahun 2015-2020 tingkat ekonomis mengalami kenaikan dan penurunan yang terjadi karena antara dana yang dianggarkan dengan yang terealisasi mendekati atau sama dengan yang sudah dianggarkan, apabila tingkat ekonomis mengalami kenaikan maka dapat dikatakan sudah mendekati atau disebut sama dengan yang dianggarkan dan kalau mengalami penurunan maka dapat dikatakan realisasi sudah jauh dari yang dianggarkan. Salah satu kenaikan tingkat ekonomis ditahun 2015-2016 dilihat dari salah satu akun anggaran belanja daerah sebesar Rp 5.649.687.263.500, sedangkan yang terealisasi sebesar Rp 5.293.741.507.697, dapat dilihat bahwa antara anggaran dan realisasi, mendekati dana yang sudah dianggarkan sehingga terjadinya kenaikan, dalam hal ini penentu naik turunnya tingkat ekonomis suatu pemerintah dapat dilihat dari realisasinya tidak lebih dari yang sudah dianggarkan. Karena apabila melebihi yang sudah dianggarkan maka dapat dikatakan tidak ekonomis, yang dapat dilihat dari ukuran penilaian ekonomis pada tabel 2.2 bab 2.

4.2.5 Efektivitas

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai sebesar 100%. Semakin tinggi persentase rasio efektivitas menunjukkan kemampuan daerah yang semakin baik. Untuk menilai tinggi rendahnya tingkat efektivitas daerah dapat mengacu Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996 pada tabel 2.5 pada bab II. Tingkat efektivitas

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dihitung menggunakan rumus berikut: (Mahsun, 2014)

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

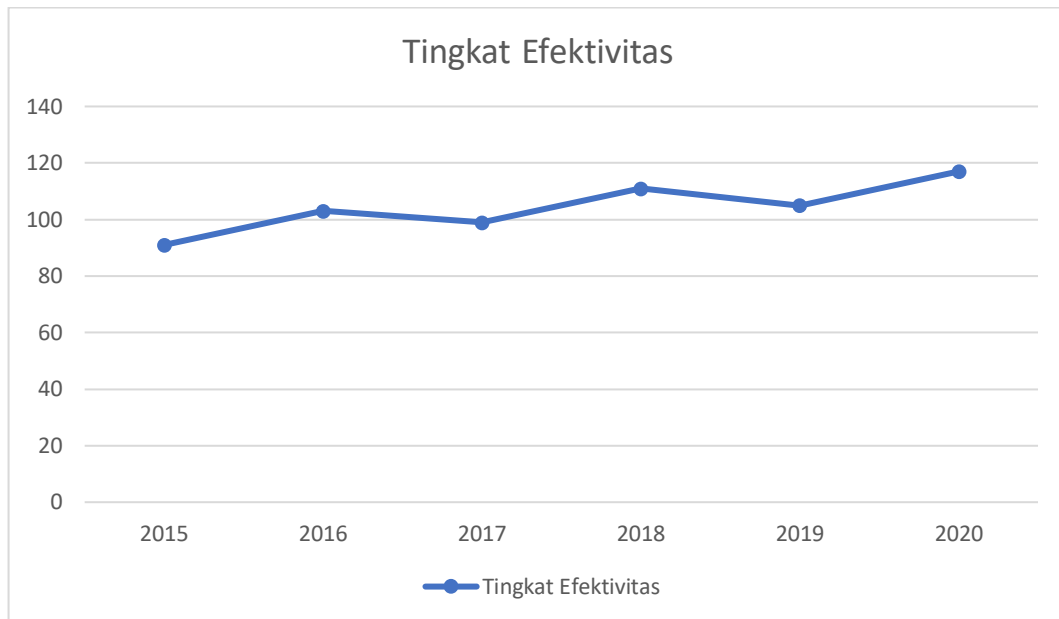
Hasil perhitungan tingkat efektivitas pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel 4.8

Tabel 4.8 Perhitungan Tingkat Efektivitas Provinsi Kalimantan Timur

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Anggaran Pendapatan (Rp)	Efektivitas (%)	Keterangan
2015	9.464.926.706.876	10.497.631.453.406	91,89	Efektif
2016	7.985.727.918.251	7.752.674.455.112	103	Sangat Efektif
2017	8.158.103.650.157	8.233.730.774.720	99,08	Efektif
2018	10.669.542.801.846	9.591.235.184.518	111	Sangat Efektif
2019	11.775.086.446.200	11.137.939.464.362	105	Sangat Efektif
2020	10.133.115.629.661	8.607.455.838.176	117	Sangat Efektif

Sumber: data diolah 2022

Perkembangan Tingkat Efektivitas Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015-2020 dapat dilihat pada gambar 4.8



GAMBAR 4.8 PERKEMBANGAN TINGKAT EFEKTIVITAS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015-2020

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan gambar 4.8 menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2015-2020 telah efektif karena persentase berada diantara 90%-100%. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling efektif berada pada tahun 2020 sebesar 117% disusul tahun 2018 sebesar 111% dan tahun 2019 sebesar 105% lalu di tahun 2017 99,08% dan terakhir di tahun 2015 yaitu 91,89%. Tingkat keefektifan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lebih stabil dan cenderung meningkat hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah berhasil dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Pada tahun 2015-2020 cenderung mengalami kenaikan yang terjadi karena antara pendapatan yang dianggarkan dengan yang terealisasi mendekati, melebihi

atau sama dengan yang sudah dianggarkan, apabila tingkat efektivitas mengalami kenaikan maka dapat dikatakan sudah mendekati, melebihi atau sama dengan yang telah dianggarkan dan kalau mengalami penurunan maka dapat dikatakan realisasi pendapatan sudah jauh dari yang dianggarkan. Salah satu kenaikan tingkat pendapatan daerah ditahun 2016 dilihat dari salah satu akun pendapatan daerah sebesar Rp 7.752.674.455.112, sedangkan yang terealisasi sebesar Rp 7.985.727.918.251, dapat dilihat bahwa antara anggaran dan realisasi, melebihi dana yang sudah di anggarakan sehingga terjadinya kenaikan, dalam hal ini penentu naik atau turunnya tingkat efektivitas suatu pemerintah dapat dilihat dari realisasinya yang kurang atau lebih dari yang sudah dianggarkan. Karena apabila melebihi yang sudah dianggarkan maka dapat dikatakan sangat efektif, yang dapat dilihat dari ukuran penilaian ekonomis pada tabel 2.3 bab 2.

4.2.6 Efisiensi

Efisiensi menggambarkan penggunaan sumber daya yang diminimalkan dan dengan hasil yang dimaksimalkan. Kinerja Pemerintah Daerah dalam memperoleh pendapatan dikatakan efisien apabila persentase efisiensi yang dicapai kurang dari 100%. Semakin kecil persentase efisiensi maka semakin baik. Untuk menilai tinggi rendahnya tingkat efisiensi daerah dapat mengacu Kepmendagri No 690. 900-327 Tahun 1996 pada tabel 2.6 pada bab II. Tingkat efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi kalimantan Timur dapat dihitung menggunakan rumus berikut: (Mahsun, 2014)

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

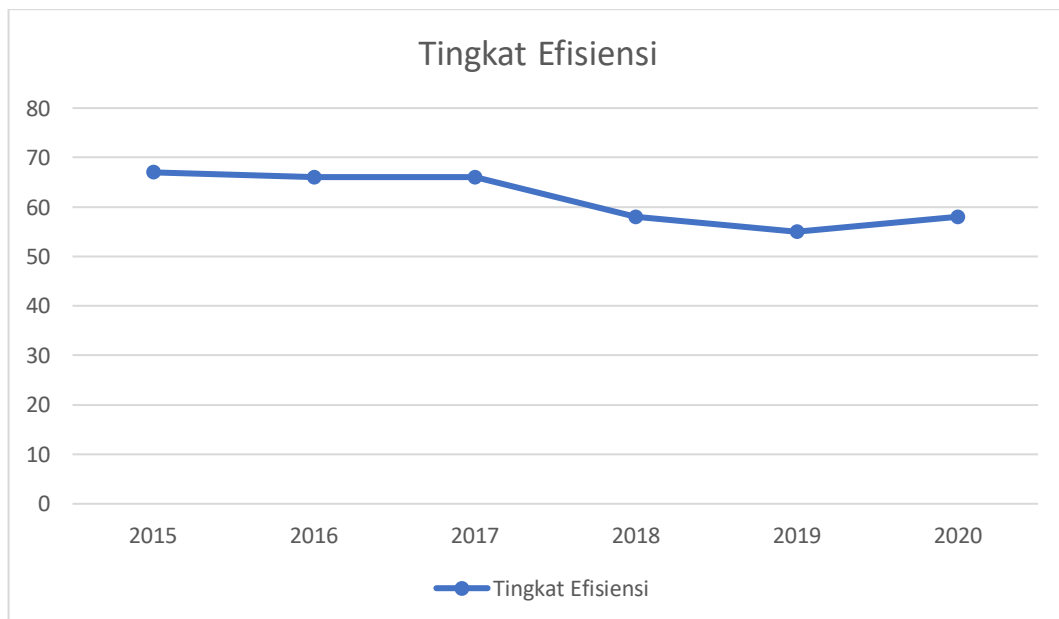
Hasil perhitungan tingkat efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel 4.9

Tabel 4.9 Perhitungan Tingkat Efisiensi Provinsi Kalimantan Timur

Tahun	Belanja Daerah(Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Efisiensi (%)	Keterangan
2015	6.388.107.684.363	9.464.926.706.876	67	Efisien
2016	5.293.741.507.697	7.985.727.918.251	66	Efisien
2017	5.446.410.626.566	8.158.103.650.157	66	Efisien
2018	6.219.052.604.351	10.669.542.801.846	58	Sangat efisien
2019	6.488.288.331.289	11.775.086.446.200	55	Sangat efisien
2020	5.917.231.922.644.	10.133.115.629.661	58	Sangat efisien

Sumber : Data diolah

Perkembangan Tingkat Efisiensi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015-2020 dapat dilihat pada gambar 4.9



Gambar 4.9 Perkembangan Tingkat Efisiensi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2020

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan perhitungan pada gambar 4.9 maka dapat diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat efisien dikarenakan persentase tingkat efisiensi dibawah 60%. dan tahun 2015-2020 menunjukkan data dibawah 60%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sangat efisien dalam meminimalkan sumber daya dan memaksimalkan hasil pendapatan daerah.

Pada tahun 2015-2018 tingkat efisiensi mengalami penurunan dan kenaikan yang terjadi karena belanja daerah jauh lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan daerah yang sudah dianggarkan, apabila tingkat efisiensi mengalami penurunan maka dapat dikatakan belanja daerah jauh lebih kecil dari pendapatan daerah yang telah dianggarkan dan kalau mengalami kenaikan maka dapat dikatakan belanja daerah sudah mendekati, melebihi atau sama dengan pendapatan daerah yang telah dianggarkan. Salah satu penurunan tingkat efisiensi ditahun 2016 dilihat dari salah satu akun pendapatan daerah sebesar Rp 7.985.727.918.251, sedangkan belanja daerah sebesar Rp 5.293.741.507.697, dapat dilihat bahwa antara pendapatan daerah dan belanja daerah, jauh lebih kecil dari dana pendapatan daerah yang sudah dianggarkan sehingga terjadinya penurunan, dalam hal ini penentu naik atau turunnya tingkat efisiensi suatu pemerintah dapat dilihat dari belanja daerah yang kurang atau lebih dari pendapatan daerah yang sudah dianggarkan. Karena apabila melebihi pendapatan daerah yang sudah dianggarkan maka dapat dikatakan tidak efisien, yang dapat dilihat dari ukuran penilaian efisiensi pada tabel 2.4 bab 2.

BAB V

PENUTUP

5.2.6 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan aspek keuangan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan aspek keuangan tahun 2015-2020 menunjukkan :
 - a. Dilihat dari rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat ketergantungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sudah tidak ada. Masyarakat Samarinda berpartisipasi tinggi dalam membayar pajak dan retribusi daerah jika dilihat dari Rasio Kemandirian keuangan Daerah.
 - b. Dilihat dari rasio Aktivitas menunjukkan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kurang baik dikarenakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur lebih mementingkan alokasi dana untuk belanja rutin, sehingga belanja pembangunan untuk membangun sarana dan prasarana bagi masyarakat rendah.
 - c. Dilihat dari rasio Pertumbuhan menunjukkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berhasil dalam meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Pertumbuhan Belanja Rutin naik, sedangkan pertumbuhan

Belanja Pembangunan menurun menunjukkan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kurang baik.

- d. Dilihat dari tingkat ekonomis menunjukkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mampu meminimalkan biaya yang dikeluarkan dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja hanya pada tahun 2015-2020, karena pada tahun 2016 tingkat ekonomis menurun tajam.
- e. Dilihat dari tingkat efektivitas menunjukkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah berhasil dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya karena tingkat efektivitas naik dari tahun 2015-2020, walaupun pada tahun 2016 tingkat efektivitas menurun.
- f. Dilihat dari tingkat efisiensi menunjukkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sangat efisien dalam meminimalkan sumber daya dan memaksimalkan hasil yang dicapai hanya pada tahun 2015-2020, karena pada tahun 2018 tingkat efisiensi mengalami kenaikan yang artinya semakin tinggi persentase efisiensi maka semakin tidak efisien dalam meminimalkan sumber daya dan memaksimalkan hasil yang dicapai.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sebaiknya dapat mempertahankan dan meningkatkan lagi pertumbuhan Belanja Pembangunan dan menurunkan Belanja Rutin agar pembangunan sarana dan prasarana berjalan secara merata dan hasilnya lebih cepat dirasakan oleh

masyarakat. Disamping itu pelayanan informasi sebaiknya diberikan secara maksimal agar masyarakat dapat dengan mudah mengetahui dan memperoleh informasi yang dibutuhkan.

2. Untuk peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian sama diharapkan untuk lebih mendalam dalam melakukan analisis dengan menambah rasio yang lain dan diharapkan agar penelitian Kepuasan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asifudin, A. J. (2004). *Etos Kerja Islami*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Astuti, W., Ariyanto. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pangaraian.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Erlangga. Jakarta.
- Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia 2014
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
- Hamidi. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. UMM Press. Malang.
- Kalalo, N. P., Tinangon, Jantje, J. E., Inggriani. (2014). *Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Manado*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- Kurniati, S. (2012). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Se-Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi 2008*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mahsun, M. (2014). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPF
- Sekretariat Negara. (1996). *Keputusan Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996*. Jakarta.
- Sekretariat Negara. (2005). *Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005*. Jakarta.
- Sekretariat Negara. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*. Jakarta.
- Sijabat, M. Y., Saleh, C., Wachid, A. (2013). *Analisis Kinerja Keuangan Serta Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012)*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Malang.
- Syafi'ie, I. K. (2004). *Ilmu Pemerintahan & Al-Qur'an*. Bumi Aksara. Jakarta
- Zikri, Z., Zulfahridar., Ilham, E. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan dan Non*

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Fakultas Ekonomi
Universitas Riau Pekanbaru.

LAMPIRAN

Lampiran 1

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014					
NO. URLIT	URAIAN	ANGGARAN 2015	REALISASI 2015	(%)	REALISASI2014
4	PENDAPATAN	10,487,831,483,408.00	9,488,826,728,878.01	90.37	11,788,828,782,021.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4,096,145,886,401.16	4,350,560,613,968.01	97.17	4,443,513,274,691.13
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	3,934,382,000,000.00	3,753,718,935,815.96	95.41	5,429,125,996,887.17
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	13,144,748,800.00	14,722,788,428.00	112.01	15,694,252,850.27
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	285,107,050,000.00	250,116,057,794.83	80.06	306,589,825,478.39
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	862,342,181,701.16	951,802,831,887.22	110.39	968,893,997,478.30
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	6,387,839,896,704.83	4,805,361,198,978.00	83.56	4,468,832,936,530.00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4,818,889,896,704.83	4,024,029,055,418.00	81.81	4,293,320,862,625.00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	758,000,000,000.00	639,155,368,798.00	84.32	862,727,209,287.00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3,542,248,496,704.83	3,166,218,536,719.00	80.32	3,032,243,333,338.00
4.2.1.3	Dana Wakaf Umum (DAU)	0.00	0.00	0.00	57,312,515,000.00
4.2.1.4	Dana Wakaf Khusus (DAK)	218,881,399,000.00	218,851,350,000.00	100.00	1,037,925,000.00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	469,030,000,000.00	479,336,143,560.00	102.20	352,611,956,905.00
4.2.2.3	Dana Penyesuaian	469,030,000,000.00	479,336,143,560.00	102.20	352,611,956,905.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14,884,806,199.00	11,404,893,000.00	78.34	16,781,878,000.00
4.3.1	Pendapatan Hibah	3,500,000,000.00	2,437,798,000.00	97.81	3,040,508,000.00
4.3.2	Pendapatan Lainnya	12,054,806,199.00	8,967,095,000.00	74.38	13,741,470,000.00
5	BELANJA	7,082,833,847,869.78	8,388,197,684,263.00	90.88	6,738,868,423,448.81
5.1	BELANJA OPERASI	4,667,146,811,076.96	4,377,842,828,185.14	93.39	4,492,781,187,876.81
5.1.1	Belanja Pegawai	1,031,807,502,125.11	942,833,986,421.87	91.35	850,548,832,815.81
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2,672,300,408,951.85	2,483,718,396,767.27	92.19	2,646,633,778,160.00
5.1.3	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.4	Belanja Hibah	977,532,000,000.00	966,801,168,000.00	98.90	909,317,897,000.00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	8,500,000,000.00	4,419,500,000.00	80.35	4,248,500,000.00
5.2	BELANJA MODAL	2,347,393,036,892.78	2,907,330,809,495.86	124.25	2,211,317,315,671.00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	48,881,289,592.00	7,284,258,685.50	15.54	19,525,268,562.00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	229,891,811,710.00	194,391,898,150.88	84.63	210,743,517,944.00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	383,582,125,245.00	344,701,173,234.00	87.58	558,526,264,059.00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,880,287,245,985.78	1,448,216,917,793.00	87.23	1,422,897,346,719.00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16,890,584,360.00	12,336,561,733.00	73.19	1,825,877,167.00
5.2.6	Belanja Modal BLUD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	18,000,000,000.00	3,434,245,678.00	19.08	1,500,000,000.00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	18,000,000,000.00	3,434,245,678.00	19.08	1,500,000,000.00
6	TRANSFER	4,431,726,182,039.28	3,817,234,609,849.00	86.13	4,868,887,341,893.78
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	2,874,912,719,218.25	2,440,678,447,219.00	84.96	2,503,201,308,381.75
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2,874,912,719,218.25	2,440,678,447,219.00	84.93	2,583,201,389,381.75
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	1,556,813,432,812.00	1,376,558,162,630.00	88.42	2,005,784,832,312.00
6.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	1,556,261,241,150.00	1,375,888,484,000.00	88.45	2,004,823,845,225.00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1,552,191,692.00	888,669,630.00	62.47	862,587,087.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(666,638,546,594.01)	(748,418,888,335.99)	78.88	11,273,426,899.77
7	PEMBAYARAN				
7.1	PENYERAHAN PEMBAYARAN	1,036,828,546,594.01	1,036,828,546,594.01	100.00	1,050,356,119,713.24
7.1.1	Penggunaan SLPA	1,036,828,546,594.01	1,036,828,546,594.01	100.00	1,050,356,119,713.24
7.2	PENGELUARAN PEMBAYARAN	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	100.00	25,000,000,000.00
7.2.2	Penyerahan Modal/Bantuan Pemerintah Daerah	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	100.00	25,000,000,000.00
	PEMBAYARAN NETTO	986,828,546,594.01	986,828,546,594.01	100.00	1,025,356,119,713.24
	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN (SLPA)	0.00	346,212,958,256.02	0.00	1,036,828,546,594.01

Lampiran 2



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	(%)	REALISASI 2015
4	PENDAPATAN	7.762.674.455.112,16	7.985.727.918.251,11	102,87	9.464.926.705.876,0
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.921.364.868.076,59	4.029.364.843.886,11	102,75	4.950.160.613.906,0
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2.942.500.000.000,00	3.127.250.928.432,79	106,28	3.753.718.935.815,9
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	16.454.410.000,00	19.435.790.560,00	118,12	14.722.788.428,0
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	168.328.483.076,59	167.385.377.650,74	99,44	230.116.057.794,8
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	794.081.975.000,00	715.292.747.242,58	90,08	951.602.831.867,2
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.818.127.539.435,57	3.946.626.961.365,00	103,37	4.503.361.198.970,0
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.813.127.539.435,57	3.941.626.961.365,00	103,37	4.024.025.055.410,0
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	739.882.675.667,00	690.750.402.589,00	93,26	639.155.369.700,0
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.960.318.081.536,57	2.154.070.924.824,00	109,88	3.166.218.336.710,0
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	65.298.295.232,00	80.402.179.000,00	123,13	0,0
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.047.628.487.000,00	1.016.403.394.952,00	97,02	218.651.350.000,0
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	479.336.143.560,0
4.2.2.3	Dana Penyesuaian	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	479.336.143.560,0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	21.182.047.660,00	9.736.113.000,00	42,00	11.404.893.000,0
4.3.1	Pendapatan Hibah	7.978.218.000,00	3.034.418.000,00	37,66	2.437.758.000,0
4.3.3	Pendapatan Lainnya	15.203.759.660,00	6.731.695.000,00	44,23	8.967.095.000,0
5	BELANJA	5.649.687.263.500,00	5.293.741.507.697,40	93,70	6.388.107.684.363,01
5.1	BELANJA OPERASI	3.990.432.128.555,00	3.720.676.880.409,42	93,24	4.377.542.629.189,1
5.1.1	Belanja Pegawai	992.500.274.003,57	875.033.041.094,07	88,16	942.603.506.421,8
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.144.941.154.551,33	1.997.496.406.815,35	93,13	2.463.718.396.767,2
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	849.120.600.000,00	844.687.442.500,00	99,48	966.801.166.000,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.870.100.000,00	3.459.990.000,00	89,40	4.419.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL	1.646.255.134.945,00	1.571.514.627.287,98	95,49	2.007.130.809.495,81
5.2.1	Belanja Modal Tanah	63.469.574.006,00	37.280.106.944,00	58,74	7.284.258.685,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	158.947.818.892,00	127.373.774.399,98	80,14	194.391.898.150,80
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	143.028.522.050,00	139.562.806.456,00	97,58	344.701.173.224,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Infrastuktur dan Jaringan	1.263.027.687.247,00	1.251.513.058.461,00	99,09	1.448.216.517.703,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.781.532.750,00	16.084.881.037,00	90,46	12.536.561.733,00
5.2.6	Belanja Modal BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	13.000.000.000,00	1.250.000.000,00	9,62	3.434.245.678,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	13.000.000.000,00	1.250.000.000,00	9,62	3.434.245.678,00
6	TRANSFER	2.339.671.736.500,00	2.307.500.831.162,00	98,62	3.817.234.609.849,00
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	1.478.522.500.000,00	1.446.352.403.000,00	97,82	2.440.676.447.219,00
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.478.522.500.000,00	1.446.352.403.000,00	97,82	2.440.676.447.219,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	861.149.236.500,00	861.148.428.162,00	99,99	1.376.558.162.630,00
6.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	859.596.236.500,00	859.596.236.500,00	100,00	1.375.588.464.000,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.553.000.000,00	1.552.191.662,00	99,95	969.698.630,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(226.684.544.887,84)	384.485.579.391,71	(169,61)	(740.415.558.335,99)
7	PEMBIAYAAN				
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	226.684.544.887,84	226.681.020.887,84	99,99	1.036.628.546.594,01
7.1.1	Penggunaan SILPA	226.684.544.887,84	226.681.020.887,84	99,99	1.036.628.546.594,01
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	50.000.000.000,00
7.2.2	Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	50.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	226.684.544.887,84	226.681.020.887,84	99,99	986.628.546.594,01
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(0,00)	611.166.600.279,55	0,00	246.212.958.258,00

Lampiran 3



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

URAIAN	REFF	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(%)	REALISASI 2016
PENDAPATAN	5.1.1	8.223.730.774.720.45	8.158.103.650.157.47	99,20	7.985.737.918.251.11
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	4.167.589.517.079.35	4.588.751.727.469.47	110,11	4.023.264.843.886.11
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	3.275.137.315.000.00	3.505.278.072.70.90	107,04	3.127.250.928.432.79
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	19.564.529.000.00	16.659.010.036.91	85,15	19.435.790.560.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lainnya PAD Yang Sah	5.1.1.1.3	212.314.202.364.35	208.807.497.552.48	98,34	167.385.377.650.74
Pendapatan Transfer	5.1.1.2	4.047.511.428.349.00	3.555.558.173.688.00	87,85	3.946.626.961.365.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	4.024.646.840.474.00	3.533.009.585.813.00	87,78	3.941.626.961.365.00
Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	824.929.219.037.00	699.621.646.540.00	73,90	695.750.462.589.00
Bagi Hasil Pajak Pajak Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	1.341.252.323.437.00	1.101.073.440.281.00	82,09	2.154.070.924.824.00
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.3	714.966.576.000.00	714.966.576.000.00	100,00	80.402.179.000.00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.1.4	1.143.558.722.000.00	1.107.407.522.592.00	96,84	1.016.403.394.952.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2	7.500.000.000.00	7.500.000.000.00	100,00	5.000.000.000.00
Dana Penyesuaian	5.1.1.2.2.1	7.500.000.000.00	7.500.000.000.00	100,00	5.000.000.000.00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3	15.384.587.875.00	15.044.587.875.00	97,94	0,00
Bantuan Keuangan dan Pemerintah Daerah Kabupaten	5.1.1.2.3.1	12.132.987.875.00	11.815.987.875.00	97,40	0,00
Bantuan Keuangan dan Pemerintah Daerah Kota	5.1.1.2.3.2	3.251.600.000.00	3.228.600.000.00	100,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	8.629.829.292.10	13.793.749.800.00	159,84	9.736.113.000.00
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	2.852.000.000.00	6.382.249.000.00	221,45	3.004.418.000.00
Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.2	5.747.829.292.10	7.411.500.800.00	128,94	6.731.695.000.00
BELANJA	5.1.2	6.009.766.572.310.00	5.445.410.626.566.14	90,63	5.293.741.507.697.40
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	4.984.215.317.185.00	4.508.054.941.929.54	90,45	3.720.678.880.409.42
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.658.837.530.010.00	1.453.136.097.293.16	87,60	1.675.013.031.094.07
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	2.244.938.273.166.00	2.103.238.650.636.38	93,69	1.967.486.406.815.35
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	1.035.431.514.000.00	847.482.734.000.00	81,51	844.687.442.500.00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	5.010.000.000.00	4.187.500.000.00	83,58	3.459.990.000.00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	1.019.251.255.125.00	938.338.759.236.60	92,06	1.571.814.627.287.98
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	730.300.000.00	575.185.000.00	78,76	37.280.106.844.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	220.471.157.025.00	186.438.111.364.08	84,56	127.373.774.889.98
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	133.550.034.200.00	107.332.290.564.52	80,37	139.862.806.456.00
Belanja Modal Jalan, Bangsi dan Jembatan	5.1.2.2.4	658.767.296.020.00	639.850.921.044.00	97,14	1.251.513.058.461.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	5.732.467.900.00	4.142.249.319.00	72,26	16.084.881.037.00
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	6.300.000.000.00	16.925.400.00	0,27	1.250.000.000.00
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	6.300.000.000.00	16.925.400.00	0,27	1.250.000.000.00
TRANSFER	5.1.3	2.825.130.802.690.00	2.781.546.337.856.00	98,46	2.307.500.831.162.00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	5.1.3.1	2.104.010.195.500.00	2.072.374.423.086.00	98,50	1.446.352.483.000.00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.3.1.1	2.104.010.195.500.00	2.072.374.423.086.00	98,50	1.446.352.483.000.00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.2	721.120.607.190.00	709.171.909.856.00	98,34	861.148.428.162.00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.3.2.1	718.868.328.240.00	707.828.791.200.00	98,43	859.596.246.500.00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.3.2.2	2.432.278.950.00	1.343.118.626.00	55,22	1.552.191.662.00
SURPLUS / (DEFISIT)		(611.166.600.279.55)	(69.853.300.264.67)	11,43	384.485.579.391.71
PEMBIAYAAN	5.1.4				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	611.166.600.279.55	611.118.124.746.55	99,99	226.681.020.887.84
Penggunaan SPPA	5.1.4.1.1	611.166.600.279.55	611.118.124.746.55	99,99	226.681.020.887.84
PENGULANGAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2				
Penggunaan Modal Investasi Pemerintah Daerah	5.1.4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
PIHAK LAIN PEMBIAYAAN	5.1.5	611.166.600.279.55	611.118.124.746.55	99,99	226.681.020.887.84
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(0,00)	541.264.815.481.88	100,00	611.166.600.279.55

Lampiran 4



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(dalam Rp.miliar)

URAIAN	REF	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
PENDAPATAN	5.1.1	9.591.235.183.518,12	10.889.542.801.946,29	111,24	8.158.197.850.157,37
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	5.129.056.874.576,00	5.800.270.285.105,87	113,04	4.588.751.727.169,47
Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.1.1	3.130.291.000.000,00	3.276.094.620.000,00	117,42	3.933.570.472.170,96
Retribusi dan Pajak Daerah	5.1.1.1.2	19.865.750.000,00	18.869.470.125,40	94,96	16.659.050.000,00
Pendapatan dari Pemeliharaan, Keamanan, Damai, dan Disiplinan	5.1.1.1.3	193.941.792.999,24	198.802.400.064,79	112,72	200.912.967.592,40
Lain-lain PAD Yang Lain	5.1.1.1.4	904.893.081.586,76	965.367.265.041,54	106,59	857.872.187.399,10
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	4.462.000.091.175,00	4.851.761.286.114,00	109,00	3.565.558.123.888,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	4.462.000.000.000,00	4.829.889.070.172,00	108,13	3.333.095.585.433,00
Sisa Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	722.000.000.000,00	760.348.180.000,00	105,46	609.271.000.000,00
Sisa Hasil Pajak Pajak Bumi dan Pajak Air	5.1.1.2.1.2	1.767.000.000.000,00	1.761.907.000.000,00	110,36	1.201.072.400.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.3	267.000.000.000,00	267.000.000.000,00	100,00	214.900.000.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.1.4	1.707.000.000.000,00	1.699.662.000.000,00	99,58	1.217.401.702.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	5.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	7.993.000.000,00
Dana Perimbangan	5.1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	7.993.000.000,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.1	24.400.000.000,00	23.900.000.000,00	97,95	12.940.500.000,00
Bantuan Keuangan dan Fungsional, Fasilitas Kesehatan	5.1.1.2.3.1.1	19.320.000.000,00	19.500.000.000,00	100,93	11.816.260.000,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Lainnya	5.1.1.2.3.2	5.080.000.000,00	4.400.000.000,00	86,61	1.221.500.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	12.271.218.467,12	15.510.730.094,52	126,40	13.792.739.000,00
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	2.472.000.000,00	3.002.300.000,00	121,41	6.302.000.000,00
Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.2	9.800.218.467,12	12.508.430.094,52	127,63	7.490.739.000,00
BELANJA	5.1.2	7.220.12.019.023,00	6.240.052.604.151,99	85,07	5.186.410.626.566,11
BELANJA OPERASIONAL	5.1.2.1	4.945.611.450.973,00	4.118.190.950.666,00	83,31	4.508.954.941.929,54
Biaya Operasional	5.1.2.1.1	1.707.144.340.000,00	1.509.000.000.000,00	88,41	1.451.100.000.000,00
Biaya Perjalanan Dinas	5.1.2.1.2	2.450.000.000.000,00	1.800.000.000.000,00	73,47	1.033.300.000.000,00
Biaya Murni	5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Hibah	5.1.2.1.4	1.077.944.430.000,00	809.340.000.000,00	75,20	693.602.200.000,00
Bantuan Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	5.800.200.000,00	5.000.000.000,00	86,20	4.157.000.000,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	2.274.096.668.190,00	1.929.259.944.294,91	84,82	910.210.759.216,60
Bantuan Modal Tetap	5.1.2.2.1	1.440.000.000,00	1.111.200.000,00	77,16	575.100.000,00
Bantuan Modal Perawatan dan Pemeliharaan	5.1.2.2.2	200.000.000.000,00	220.000.000.000,00	110,00	185.500.000.000,00
Bantuan Modal Investasi dan Pembangunan	5.1.2.2.3	140.200.000.000,00	101.500.000.000,00	72,39	127.120.000.000,00
Bantuan Modal Jalan, Jembatan dan Drainase	5.1.2.2.4	1.500.000.000.000,00	1.400.000.000.000,00	93,33	630.000.000.000,00
Bantuan Modal Alat, Bahan, dan Jasa	5.1.2.2.5	32.000.000.000,00	17.700.000.000,00	55,31	4.600.000.000,00
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	6.133.900.000,00	393.710.194,00	6,42	16.925.000,00
Bantuan Tak Terduga	5.1.2.3.1	6.133.900.000,00	393.710.194,00	6,42	16.925.000,00
TRANSFER	5.1.3	3.105.767.980.677,00	3.097.061.459.139,00	99,72	2.791.516.312.856,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	5.1.3.1	2.111.111.151.000,00	2.106.201.430.000,00	99,74	2.072.171.423.000,00
Transfer Sisa Hasil Pajak Daerah	5.1.3.1.1	2.111.111.151.000,00	2.106.201.430.000,00	99,79	2.072.144.423.000,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.2	694.351.829.677,00	690.723.021.139,00	99,48	709.171.909.856,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Daerah Lainnya	5.1.3.2.1	600.221.888.700,00	600.501.400.700,00	100,03	602.025.761.200,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.3.2.2	2.131.800.000,00	2.131.150.000,00	99,96	1.361.110.000,00
SUBTOTAL / NETO (1)		(517.574.815.481,88)	1.124.405.738.155,20	(216,70)	(69.853.769.264,67)
PEMBAYARAN	5.1.4				
PEMBAYARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	541.264.815.481,88	541.264.815.481,88	100,00	611.118.124.746,55
Perdagangan & PA	5.1.4.1.1	541.264.815.481,88	541.264.815.481,88	100,00	611.118.124.746,55
PEMBELIAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2	1.690.000.000,00	1.690.000.000,00	0,00	0,00
Persewaan, Sewa, dan Pemeliharaan Gedung	5.1.4.2.1	1.690.000.000,00	1.690.000.000,00	0,00	0,00
PEMBAYARAN NETO		517.574.815.481,88	517.574.815.481,88	100,00	611.118.124.746,55
SALAH SISI PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.5	0,00	1.862.060.551.627,09	0,00	511.264.815.481,88

Lampiran 5



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam Rupiah)

URAIAN	REFV	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
PENDAPATAN	5.1.1	11.137.939.446.361,99	11.775.086.446.209,49	105,72	10.669.542.801.246,20
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	5.794.714.345.761,92	6.555.852.805.408,40	113,14	5.300.276.285.395,68
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	4.682.000.000.000,00	4.984.520.517.158,50	106,46	4.216.094.876.324,09
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	19.826.525.000,00	26.494.287.129,95	133,63	18.955.623.325,46
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	184.125.220.264,19	392.379.951.610,19	213,10	199.392.899.964,79
Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.4	908.762.600.498,73	1.152.458.049.509,76	126,82	865.317.286.091,34
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	5.330.833.100.600,00	5.204.311.550.792,00	97,63	4.853.761.786.447,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	5.299.678.060.000,00	5.176.264.298.792,00	97,67	4.829.780.659.372,00
Basis Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	637.329.276.800,00	402.647.093.800,00	63,18	599.348.148.844,00
Basis Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	2.640.993.286.000,00	2.804.521.101.842,00	106,19	2.391.882.976.117,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.3	815.693.641.000,00	815.693.641.000,00	100,00	767.682.423.600,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.1.4	1.205.661.866.000,00	1.153.401.862.150,00	95,67	1.070.867.111.411,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2	9.883.392.000,00	9.883.392.000,00	-	-
Dana Penyesuaian	5.1.1.2.2.1	9.883.392.000,00	9.883.392.000,00	-	-
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3	21.271.639.200,00	18.163.850.000,00	85,39	23.981.122.075,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten	5.1.1.2.3.1	15.815.539.200,00	12.943.800.000,00	81,84	18.567.627.075,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota	5.1.1.2.3.2	5.456.100.000,00	5.220.050.000,00	95,67	5.413.500.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	12.392.000.000,00	14.922.000.000,00	120,42	15.516.730.093,52
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	3.192.000.000,00	3.192.000.000,00	100,00	5.092.765.093,52
Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.2	9.200.000.000,00	11.730.000.000,00	127,50	9.817.965.000,00
BELANJA	5.1.2	7.790.411.761.586,22	6.488.228.331.289,85	83,28	6.248.052.604.351,99
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	5.940.390.533.457,75	5.279.509.090.054,26	88,87	4.418.398.950.666,08
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.959.660.650.976,82	1.697.114.398.082,42	86,60	1.509.100.869.804,56
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	3.155.831.149.747,35	2.767.688.216.971,84	87,70	1.874.269.755.461,65
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	-	-	-	-
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	815.124.182.733,58	806.273.565.000,00	98,91	1.029.946.325.399,87
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	9.724.500.000,00	8.432.500.000,00	86,72	5.052.400.000,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	1.825.021.228.128,47	1.207.815.521.798,59	66,18	1.829.259.943.292,91
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	354.000.000,00	3.998.500,00	1,13	1.311.380.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	572.041.910.314,73	328.324.174.361,33	57,40	223.326.347.063,16
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	409.409.176.974,00	299.303.693.500,70	73,11	101.555.719.988,12
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	809.526.348.214,74	549.189.919.990,56	67,84	1.489.316.109.327,63
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	33.689.792.625,00	30.993.735.446,00	92,00	13.590.396.864,00
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	25.000.000.000,00	903.729.437,00	3,61	393.710.393,00
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	25.000.000.000,00	903.729.437,00	3,61	393.710.393,00
TRANSFER	5.1.3	5.109.588.238.413,78	4.899.390.178.060,78	95,89	3.097.004.459.339,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	5.1.3.1	3.087.791.772.893,00	2.892.136.260.478,00	93,66	2.406.281.438.000,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.3.1.1	3.087.791.772.893,00	2.892.136.260.478,00	93,66	2.406.281.438.000,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.2	2.021.796.465.520,78	2.007.253.917.582,78	99,28	690.723.021.339,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.3.2.1	2.019.664.501.582,78	2.005.183.251.582,78	99,28	688.591.865.739,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.3.2.2	2.131.963.938,00	2.070.666.000,00	97,12	2.131.155.600,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(1.762.060.553.637,08)	387.467.936.849,74	(21,99)	1.324.485.738.155,20
PEMBIAYAAN	5.1.4				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	1.862.060.553.637,08	1.861.926.227.625,08	100,00	541.264.815.481,88
Penerimaan SilPA	5.1.4.1.1	1.862.060.553.637,08	1.861.926.227.625,08	100,00	541.264.815.481,88
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2	100.000.000.000,00			3.690.000.000,00
Konsumsi Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.4.2.1	100.000.000.000,00			3.690.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		1.762.060.553.637,08	1.861.926.227.625,08	105,67	537.574.815.481,88
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.5		2.249.394.164.474,82		1.862.060.553.637,08

Lampiran 6



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

URAIAN	REFF	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
PENDAPATAN	5.1.1	8.607.455.838.176,18	10.133.115.629.661,60	117,72	11.775.086.446.700,40
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	4.326.324.617.227,18	5.289.232.781.584,58	122,26	6.555.852.805.408,37
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	3.392.790.000.000,00	3.900.431.414.928,51	114,96	4.984.520.517.158,59
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	12.034.562.250,00	9.754.134.848,94	79,68	20.454.207.129,92
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	133.813.720.047,42	110.989.930.348,20	82,94	302.379.951.610,14
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	787.386.334.929,76	1.268.058.595.759,91	161,05	1.152.459.049.569,78
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	4.269.870.407.949,00	4.831.866.271.077,00	113,14	5.204.311.550.792,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	4.197.531.581.949,00	4.759.527.447.077,00	113,39	5.176.264.298.792,00
Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	568.144.049.800,00	699.159.503.579,00	121,97	402.547.893.000,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	2.105.925.629.850,00	2.864.480.185.358,00	132,25	2.894.521.101.842,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.3	834.938.558.000,00	831.404.750.000,00	99,58	815.693.641.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.1.4	628.523.344.200,00	303.483.092.140,00	48,11	1.153.403.862.100,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2	22.338.826.000,00	22.338.826.000,00	100,00	9.881.392.000,00
Dana Penyesuaian	5.1.1.2.2.1	22.338.826.000,00	22.338.826.000,00	100,00	9.881.392.000,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3	-	-	-	18.163.860.000,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten	5.1.1.2.3.1	-	-	-	12.943.860.000,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota	5.1.1.2.3.2	-	-	-	5.220.000.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	11.260.813.000,00	12.016.575.000,00	106,71	14.922.090.000,00
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	3.256.420.000,00	3.256.420.000,00	100,00	3.192.000.000,00
Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.2	8.004.393.000,00	8.760.155.000,00	109,44	11.730.090.000,00
BELANJA	5.1.2	7.196.838.629.833,00	5.917.231.922.644,25	82,22	6.488.228.331.289,85
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	5.365.251.220.104,44	4.624.449.956.327,89	86,19	5.279.509.080.054,26
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.922.925.701.353,82	1.668.690.859.233,06	86,75	1.697.114.305.082,42
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	3.203.204.965.688,62	2.779.848.269.032,83	86,78	2.767.688.216.921,84
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	-	-	-	-
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	223.150.903.062,00	163.932.628.052,00	73,50	805.273.965.000,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	16.070.560.000,00	12.578.260.000,00	78,27	8.432.500.000,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	1.331.587.409.728,56	1.066.605.762.730,10	80,10	1.207.815.521.798,59
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	24.407.500,00	24.407.500,00	100,00	3.988.500,00
Belanja Modal Perlatan dan Mesin	5.1.2.2.2	958.723.064.113,92	418.049.848.727,25	43,61	328.324.174.361,33
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	289.523.223.447,64	247.161.472.427,00	85,38	299.303.693.500,70
Belanja Modal Jalan, Jembatan dan Jembatan	5.1.2.2.4	465.161.307.801,80	374.898.904.007,59	80,58	543.186.919.000,56
Belanja Modal Alat, Teloop Lainnya	5.1.2.2.5	29.175.396.975,00	20.561.230.068,30	70,49	33.993.735.446,80
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	500.000.000.000,00	226.176.203.586,27	45,24	903.729.437,00
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	500.000.000.000,00	226.176.203.586,27	45,24	903.729.437,00
TRANSFER	5.1.3	3.510.011.372.818,00	3.411.272.539.834,00	97,19	4.899.390.178.000,78
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	5.1.3.1	1.911.308.336.000,00	1.863.237.603.015,00	97,48	2.892.136.280.478,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.3.1.1	1.911.308.336.000,00	1.863.237.603.015,00	97,48	2.892.136.280.478,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.2	1.598.703.036.818,00	1.548.034.936.819,00	96,83	2.007.253.917.582,78
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.3.2.1	1.508.703.036.818,00	1.548.034.936.819,00	96,83	2.005.183.253.862,78
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.3.2.2	-	-	-	2.070.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(2.099.394.164.474,82)	804.611.167.181,33	(38,33)	387.467.836.848,74
PEMBIAYAAN	5.1.4				
PEKERJAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	2.249.394.164.474,82	2.249.383.814.348,23	100,00	1.861.928.237.625,06
Perguruan Tinggi	5.1.4.1.1	2.249.394.164.474,82	2.249.383.814.348,23	100,00	1.861.928.237.625,06
PENGEJARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2	150.000.000.000,00	100.000.000.000,00	66,67	-
Penerjemahan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.4.2.1	150.000.000.000,00	100.000.000.000,00	66,67	-
PEMBIAYAAN NETO		2.099.394.164.474,82	2.149.383.814.348,23	102,38	1.861.928.237.625,06
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.5		2.951.994.981.531,53		2.249.394.164.474,82

GUBERNUR,

H. ISRAN NOOR